

- Pagu Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2014 sebesar Rp. 5.170.936.769,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.826.264.421,00 atau sebesar 93,33%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.001.999.087,00 atau sebesar 94,06% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.824.265.334,00 atau sebesar 92,83%.
- Pagu Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2015 sebesar Rp. 5.703.792.733,00 atau naik sebesar 10,30% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.13 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melestarikan Aset Budaya dan Mengembangkan Potensi Pariwisata Unggulan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	100,00	100,00	100,00	10,00	3,00	30,00
		Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Tempat	100,00	100,00	100,00	11,00	5,00	45,45
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	58,82	58,82	100,00	23,00	10,00	43,48
		Prosentase Sanggar Seni yang Aktif	%	80,19	80,19	100,00	125,00	94,00	75,20
		Prosentase Situs Budaya yang Terpelihara	%	58,82	58,82	100,00	23,00	10,00	43,48
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik)	Orang	94,57	94,57	100,00	95.000	57.596	60,63
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Asing)	Orang	45,34	45,34	100,00	6.000,00	2.312,00	38,53
		Prosentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Tingkat Hunian Hotel	%	19,05	19,05	100,00	100,00	100,00	100,00
		Rasio Destinasi Wisata Unggulan	Tempat	31,25	31,25	100,00	80,00	30,00	37,50
2	Mengembangkan Potensi Generasi Muda dan Prestasi Olahraga	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Per 1.000 Penduduk	Unit	100,00	100,00	100,00	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Lapangan Olahraga Per 1.000 Penduduk	Buah	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemuda	Kegiatan	100,00	100,00	100,00	4,00	4,00	100,00
		Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten Yang Diselenggarakan	Event	90,90	90,90	90,90	13,00	11,00	84,62
		Jumlah Event Olahraga Tingkat Regional Yang Diikuti	Event	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Event Olahraga Tingkat Nasional Yang Diikuti	Event	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00
		Pembinaan Olahraga Kepada Pengda Keolahragaan di Kabupaten	Pengda	100,00	100,00	100,00	33,00	33,00	100,00
		Jumlah Kelompok Kewirausahaan Pemuda	Kelompok	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Siswa Berprestasi Dibidang Olahraga	Siswa	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	100,00
		Prosentase Guru Olahraga Latar Belakang Olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Olahraga Rekreasi Yang Dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Olahraga Prestasi Yang Berprestasi	%	51,61	51,61	51,61	31,00	18,00	58,06

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 sebesar Rp. 5.353.801.038,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.008.967.052,00 atau sebesar 95,05%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.596.164.518,00 atau sebesar 99,19% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.492.802.534,00 atau sebesar 93,27%.
- Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 sebesar Rp. 4.595.311.847,00 atau menurun sebesar 14,17% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berubah menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga.

**2.2.14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 sebesar Rp. 1.346.592.501,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.224.901.179,00 atau sebesar 90,96%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 594.868.179,00 atau sebesar 99,95% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 630.033.000,00 atau sebesar 83,84%.
- Pagu Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 sebesar Rp. 1.294.416.948,00 atau menurun sebesar 3,87% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.2.15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terselenggaranya Upaya Pencegahan Dini Dan Mitigasi Guna Menghindari Terjadinya Bencana Serta Mengurangi Resiko Bencana	Jumlah Potensi Daerah Rawan Bencana Didaerah Sekabupaten Kubu Raya Dapat Terdeteksi/Tertetapkan	Potensi	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00
		Prosentase Kec/Desa Dengan Hasil Hot Spot (Titik Api) Terbanyak Dan Perlu Penanganan	%	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
2	Terselenggaranya Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Logistik Penanganan Kedaruratan Bencana Serta Peningkatan Mobilitas Sumber Daya Dalam Rangka Penyelamatan Dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana	Jumlah Barang-Barang Pasokan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Yang Terdistribusi	Pasokan	-	-	-	334,00	200,00	59,88

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Terselenggaranya Upaya Pemulihan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum, Kesehatan, Fungsi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Akibat Bencana	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Ketinggian Air Diatas Setengah Meter Dan Perlu Mendapat Prioritas Penanganan	Kec	3,00	3,00	100,00	3,00
							9
							10
							3,00
							100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.346.592.501,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.272.232.047,00 atau sebesar 94,86%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 791.149.358,00 atau sebesar 99,03% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 481.082.689,00 atau sebesar 88,73%.
- Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 5.972.017.817,00 atau naik sebesar 345,31% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.16 Sekretariat Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Jumlah Dokumen LKPJ	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Persentase Jumlah Dokumen LPPD Kepada Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Terselenggaranya Rakor Unsur Muspida	Kegiatan	100%	40,86%	40,86	3,00	-	0,00
		Jumlah Raker Unsur Pimpinan Kecamatan	Kegiatan	100%	73,86%	73,86	2,00	2,00	100,00
		Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kegiatan	100%	99,99%	99,99	1,00	-	0,00
		Jumlah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Kegiatan				1,00	-	0,00
		Jumlah Penegasan Batas Daerah	Dokumen				5,00	5,00	100,00
		Jumlah Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Kecamatan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Monitoring Administrasi Kecamatan	Dokumen				10,00	10,00	100,00
		Terlaksananya Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kecamatan				2,00	3,00	150,00
		Terlaksananya Fasilitasi Otonomi Daerah dan Koordinasi Kecamatan	Dokumen				40,00	23,00	57,50
		Terlaksananya Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil	%				100,00	100,00	100,00



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen EKPOD Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kajian Teknis Pemekaran Kecamatan	Dokumen				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Data Pembentukan Kelurahan	Dokumen				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Fasilitas Penunjang PATEN	Kecamatan				4,00	4,00	100,00
		Laporan Dokumen Kegiatan WD4, Profil Kecamatan dan Laporan Harian Camat	%				100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Mental Spiritual	Jumlah Tim Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Data Yang Jelas dan Lengkap Mengenai Jumlah Pontren, Rumah Ibadah, Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Gambaran dan Pengetahuan Dalam Tata Cara Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Dalam Pemberian Dana Bansos/Hibah Kepada Pihak Terkait	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Jamaah Haji	Orang				250,00	250,00	100,00
		Jumlah Peningkatan Ukhuwa Islamiyah Antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Masyarakat	Kecamatan				9,00	9,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Masyarakat Kecamatan Untuk Ikut Serta Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan	Kecamatan				3,00	3,00	100,00
		Jumlah Lembaga Keagamaan	Lembaga				5,00	5,00	100,00
		Jumlah Peserta dalam Mengikuti Perlombaan MTQ Tingkat Provinsi	Peserta				30,00	30,00	100,00
		Jumlah Pendidikan Non Formal	Kecamatan				3,00	3,00	100,00
		Jumlah Organisasi Kelembagaan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Profesionalisme SDM	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
3	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan Untuk Kepentingan Publik	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Berupa Data Foto, Audio dan Video	Peliputan	100%	76,65%	76,65	212,00	173,00	81,60
		Jumlah Publikasi Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Publikasi	100%	74,04%	74,04	117,00	117,00	100,00
		Jumlah Dialog Interaktif Melalui Televisi dan Radio	Kali	100%	62,26%	62,26	5,00	4,00	80,00
		Jumlah Penyebaran Informasi Di Media Cetak dan Elektronik	Kali	100%	74,05%	74,05	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Buletin Pemkab Kubu Raya	Buku	100%	44,69%	44,69	600,00	600,00	100,00
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan	Kali	100%	60,64%	60,64	2,00	2,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	SKPD	-	-	-	38,00	38,00	100,00
		Jumlah Pengadaan Sarana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan	Paket	-	-	-	1,00	1,00	100,00
4	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengawasan Yang Berdaya Guna Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Lakip Kabupaten Kubu Raya	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah AKIP SKPD di Lingkungan Kegiatan Kehumasan	SKPD				2,00	2,00	100,00
		Jumlah IKU Kabupaten dan IKU SKPD	SKPD				39,00	39,00	100,00
		Jumlah Formasi Jabatan PNS di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Penetapan Kinerja SKPD dan PK Kabupaten Kubu Raya	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah SKPD Dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Bimtek dan Tersusunnya Analisis Beban Kerja	Paket				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Permasalahan Bidang Organisasi dan Kelembagaan	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPM	SKPD	100%	12,50%	12,50	15,00	15,00	100,00
		Jumlah Pengetahuan SKPD Dalam Penyusunan SPM	SKPD	-	-	-	15,00	15,00	100,00
		Jumlah IKM Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah SOP SKPD di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Penyusunan SOP di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Perubahan SOPD di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pakta Integritas Seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Kubu Raya	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Bimtek dan Tersusunnya Analisis Jabatan	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Reformasi Birokrasi	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Data Base KWT	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Evaluasi DEMAPAN, P2KP dan Daerah Rawan Pangan	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Konsumsi Pangan Bergizi Masyarakat	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Program Keamanan Pangan Segar	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Usaha Pengelolaan Hasil Pangan Lokal	% Kelompok				100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perikanan, Keanekaragaman Hayati, Kehutanan dan Perkembangan Serta ESDM								

RP 2 R

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Database Desa Mandiri Pangan	Desa				3	3	100
		Jumlah Kegiatan Kampanye dan Promosi 3B-AH/B2SA	%	100,00	95,28	95,28	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Data NBM	%	100,00	98,57	98,57	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Buku Laporan Hasil Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	%	100,00	93,86	93,86	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Program Keamanan Pangan Segar	%	100,00	96,01	96,01	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Data Base Desa Mandiri Pangan	Desa	100%	90,78%	90,78	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Database GAPOKTAN (Kelompok Tani/Kelompok Afinitas)	Desa	100%	88,34%	88,34	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Data dan Informasi SKPG Secara Rutin dan Tepat Waktu	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Modal dalam Rangka Stabilitas Harga Gabah/Beras	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Penyaluran RASKIN	%	100,00	86,56	86,56	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Evaluasi PLDPM di Kabupaten Kubu Raya	%	100,00	86,56	86,56	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Stok Cadangan Pangan Ditingkat Desa dan Tercapainya Kualitas Gabah dari Kadar Air 26% menjadi 14%	%				100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi %	Target	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Wilayah Perbatasan Dalam Suatu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi yang Terintegrasi dan Strategis	Jumlah Laporan TEPPA Jumlah Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah Jumlah Kegiatan di Bidang Ekonomi Kerakyatan Jumlah Kinerja Usaha Daerah Jumlah Kegiatan di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Model/Pola Kemitraan dalam Rangka Kerjasama Ekonomi Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif atau Industri Kreatif Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten Kubu Raya Jumlah Informasi dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Laporan Jumlah Informasi dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Laporan Pelaksanaan Pameran/Expo Jumlah Pola KPS Jumlah Kondisi Pemukiman yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	Laporan BUMD Kecamatan BUMD Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kali Kali SKPD Kecamatan	100% 100% 100%       100% -	53,66% 89,64% 99,82%       61,78% -	1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 4,00 38,00 9,00	1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 4,00 38,00 9,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Perolehan Laba Usaha Daerah	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Kondisi Pemukiman yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah	SKPD				38,00	38,00	100,00
7	Meningkatnya Kinerja Aparatus, Pengawasan yang Berdayaguna untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Administrasi serta Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Tanah-Tanah Aset Pemda	SKPD				38,00	38,00	100,00
		Jumlah Tanah Fasilitas Pemda dan Kepentingan Umum	Kecamatan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Data Harga Dasar Tanah	Kecamatan				4,00	4,00	100,00
		Terfasilitasinya Konflik-Konflik Pertanahan	Kecamatan				9,00	9,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Perusahaan	Kecamatan				9,00	9,00	100,00
		Jumlah Pegawai dalam Berpakaian Dinas	%				100,00	100,00	100,00
8	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Aparatur untuk Mendorong Terciptanya Pelayanan kepada Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kubu Raya	%				100,00	90,00	90,00
		Jumlah Kegiatan Penataan Dokumen/Arsip PNS Setda	Dokumen				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/DPRD/Kepala Daerah	Orang	2,00	2,00	100,00	2,00	1,00	50,00

*Handwritten signature/initials*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	%	100,00	99,55	99,55	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pengetahuan SDM dengan Membaca Koran dan Majalah	Koran Majalah	100%	98,27%	98,27	5,00	4,00	80,00
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Staf Ahli Bupati	Orang	100%	78,63%	78,63	5,00	5,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan Taman	%	100,00	65,94	65,94	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	78,84	78,84	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Sistem Informasi Perencanaan SKPD	%				100,00	90,00	90,00
		Jumlah Sarana Komunikasi Data melalui Radio SSB/2 Mtr Band	%				100,00	100,00	100,00
		Jumlah Tenaga Persandian dan Telekomunikasi yang Handal	Orang				3,00	2,00	80,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	Unit				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Unit				1,00	1,00	100,00



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Buku LAKIP Setda	Laporan				1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Semester	Laporan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Peningkatan SDM sebagai Pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD	Orang	100%	72,83%	72,83	5,00	5,00	100,00
9	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Aparatur untuk Mendorong Terciptanya Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket	100%	35,51%	35,51	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100,00	70,05	70,05	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100,00	21,03	21,03	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kebersihan Kantor	%	100,00	65,94	65,94	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100,00	55,81	55,81	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat Kepala Daerah	%	100,00	92,93	92,93	100,00	100,00	100,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100,00	52,46	52,46	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	%	100,00	83,32	83,32	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Daerah	Paket	100%	42,33%	42,33	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	100%	79,84%	79,84	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Paket	100%	90,19%	90,19	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Meja dan Kursi Kerja untuk Pemerintah Daerah	Paket	100%	99,95%	99,95%	1,00	1,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	%	100,00	54,74	54,74	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	%	100,00	99,64	99,64	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	%	100,00	97,95	97,95	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Studio dan Komunikasi	%	100,00	99,94	99,94	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 25.900.018.613,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.348.871.935,00 atau sebesar 86,29%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.432.394.924,00 atau sebesar 98,22% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.916.477.011,00 atau sebesar 88,73%.
- Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 56.729.852.620,00 atau naik sebesar 119,03% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Banyaknya perbedaan pada Satuan Indikator Kinerja Utama antara Tahun 2013 dengan Tahun 2014.

**2.2.17 Sekretariat DPRD**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Keterampilan dan Profesionalisme Anggota DPRD	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Serapan Aspirasi yang Berkembang di Daerah Pemilihan Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (PSDM) Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Serapan Aspirasi yang Berkembang di Daerah Pemilihan	Kali	135,00	135,00	100,00	135,00	90,00	66,67
208,00				192,00	92,31	163,00	146,00	89,57	
540,00				476,00	88,15	135,00	81,00	60,00	
2	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum yang disetujui oleh DPRD	Jumlah Raperda yang disusun dan dibahas	Orang	900,00	856,00	95,11	540,00	490,00	90,74
	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	Dokumen		5,00	5,00	100,00	6,00	6,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2014 sebesar Rp. 24.386.079.138,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.852.120.237,00 atau sebesar 89,61%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.298.228.479,00 atau sebesar 97,09% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.553.891.758,00 atau sebesar 88,73%.

- Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebesar Rp. 20.561.994.843,00 atau menurun sebesar 15,68% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

**2.2.18 Inspektorat Daerah**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengawasan Yang Berdaya Guna Untuk Mendukung Kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan LP2P Kabupaten Kubu Raya Pemeriksaan TP dan TGR Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sosialisasi LHKPN	Orang SKPD LHP Dokumen TLHP Kegiatan LHP Desa Dokumen Berkas Kasus Dokumen Paket	7,00 16,00 7,00 1,00 128,00 2,00 24,00 1,00 901,00 1,00 1,00 1,00	2,00 16,00 - 1,00 - 2,00 24,00 1,00 - - 1,00	9,05 100,00 64,77 100,00 - 100,00 100,00 100,00 77,28 0,00 100,00	6,00 25,00 6,00 1,00 25,00 1,00 28,00 1,00 927,00 1,00 1,00 1,00	3,00 25,00 6,00 1,00 32,00 1,00 28,00 1,00 977,00 2,00 1,00 1,00	50,00 100,00 100,00 100,00 128,00 100,00 100,00 100,00 105,39 200,00 100,00 100,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sosialisasi SPIP	Paket	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Review LAKIP SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1,00	100,00	38,00	33,00	86,84
		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Orang	6,00		83,35	3,00	3,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 5.121.730.164,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.771.574.789,00 atau sebesar 93,16%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.445.729.000,00 atau sebesar 97,89% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.325.845.789,00 atau sebesar 88,66%.

- Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 6.216.583.780,00 atau naik sebesar 21,38% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

**2.2.19 Badan Kepegawaian Daerah**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Sistem Pelayanan Prima Dan Bertanggung Jawab Sejalan Dengan Prinsip Good Governance Bagi Seluruh Aparatur Untuk Mendorong Terciptanya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Meningkatkan Kapasitas Pembangunan Daerah	Persentase Data PNS Yang Terhimpun Dalam Database SAPK Dan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian  Jumlah Penyelesaian Administrasi Kepegawaian (KARIS/KARSU, KARPEG) Dan Penyelenggara Sumpah PNS	PNS	8.000,00	7.820,00	97,75	4.982,00	5.320,00	106,78
2	Meningkatkan Profesionalisme Dan Kompetensi Aparatur Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah Serta Kemampuan Pegawai Yang Berdayaguna Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah , Dan Ujian Sertifikasi  Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan Perjenjangan  Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Formal Dan Bimtek PNS  Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Formal Dan Bimtek PNS  Jumlah Data Pegawai Pensiun Yang Diproses Tepat Waktu  Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Dan Fungsional	PNS	60,00	112,00	186,67	51,00	74,00	145,10
				168,00	196,00	116,67	8,00	2,00	25,00
				481,00	568,00	118,09	150,00	164,00	109,33
				350,00	391,00	111,71	120,00	97,00	80,83
				500,00	611,00	122,20	110,00	188,00	170,91
				1.600,00	2.404,00	150,25	1.000,00	1.032,00	103,20

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	8.000,00	7.820,00	97,75	4.982,00	5.320,00	106,78
3	Menjamin Penyelenggaraan Program Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Partisipasi Publik Dan Penegakan Hukum	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Kenaikan Pangkat Jumlah Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Kepegawaian Jumlah PNS Yang Menerima Penghargaan/Reward	PNS PNS PNS	72,00	72,00	100,00	18,00	21,00	116,67
				4.961,00	4.724,00	95,22	408,00	307,00	75,25

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 4.646.801.438,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.457.444.219,00 atau sebesar 95,92%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.228.291.359,00 atau sebesar 96,13% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.229.152.860,00 atau sebesar 95,73%.
- Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 5.277.938.781,00 atau naik sebesar 13,58% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.



2.2.20 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Penerimaan Sumber Pendapatan Daerah - Penerimaan PAD - Penerimaan BPHTB - Penerimaan PBB - Penerimaan Retribusi Daerah - Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	% % % % % %	100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00	117,74 129,43 102,49 110,49 100,00 14,44	117,74 129,43 102,49 110,49 100,00 14,44	100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00	115,00 119,00 113,00 115,00 100,00 56,00	115,00 119,00 113,00 115,00 100,00 56,00
		Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - DAU - DAK Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Bantuan Keuangan dari Provinsi/ atau Pemerintah Daerah Lainnya - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	% % % % % %	100,00 100,00 100,00	86,63 100,00 100,00	86,63 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	107 100,00 100,00	107,00 100 100
			%	100,00	83,65	83,65	100,00	47,00	47,00
			%	100,00	49,36	49,36	100,00	101,00	101,00
			%	100,00	83,25	83,25	100,00	80,00	80,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Tentang APBD	Perda	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Penjabaran APBD	Peraturan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Perda	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Pedoman Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Juknis	20,00	20,00	100,00	20,00	25,00	125,00
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Akuntansi	Serapan Anggaran Gaji 40 SKPD	%	100	98,65	98,65	100	99,63	99,63
		Serapan Belanja Daerah Terhadap	%	100	93,97	93,97	100	91,61	91,61
		Serapan Belanja Tidak Langsung	%	100	76,36	76,36	100	91,34	91,34
		Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
4	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Aset	Prosentase SKPD Yang Menyampaikan SPJ Tepat Waktu	%	100,00	98,75	98,75	100,00	99,00	99,00
		Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Perkembangan Inventaris Barang	%	100	17,90	17,90	100	97,72	97,72
		Penghapusan Barang Milik Pemda	%	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Kepemilikan Atas Barang Daerah	Unit	-	-	-	20,00	19,00	95,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 63.985.993.950,40 dengan realisasi sebesar Rp. 53.202.670.888,87 atau sebesar 83,15%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 46.252.020.805,00 atau sebesar 91,45% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.625.190.182,00 atau sebesar 94,16%.
- Pagu Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 11.305.915.700,00 atau menurun sebesar 82,33% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Pendapatan Daerah.

### 2.2.21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan tertib Perda (PKL dan Fasilitas Umum)	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kali				8,00	4,00	50,00
2	Anggota Tenaga Satpol PP Yang Bertugas dan Yang Ada di Kecamatan	Polisi Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kali				3,00	1,00	33,33

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 sebesar Rp. 5.653.221.499,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.401.047.801,00 atau sebesar 95,79%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.264.210.651,00 atau sebesar 97,87% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.136.837.150,00 atau sebesar 95,18%.
- Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 sebesar Rp. 7.503.167.308,00 atau naik sebesar 33,08% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Tahun 2015 Satpol PP bergabung dengan Linmas menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas. Linmas Tahun 2014 masih menjadi Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

## 2.2.22 Kecamatan Sungai Raya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
		Jumlah Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Di Desa	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
2	Peningkatan Situasi Kemananan dan Peluang Usaha Yang Semakin Kondusif di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Ketentraman dan Keteriban di Desa	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sesuai Rencana dan Kebutuhan Melalui Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Pembinaan ke Desa Dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	Desa	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Perizinan	Rekom	150,00	291,00	194,00	150,00	373,00	248,67

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Raya Tahun 2014 sebesar Rp. 2.939.578.670,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.764.122.495,00 atau sebesar 94,03%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.434.509.442,00 atau sebesar 96,31% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.329.613.053,00 atau sebesar 91,69%.

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Raya Tahun 2015 sebesar Rp. 2.525.088.039,00 atau menurun sebesar 14,10% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

### 2.2.23 Kecamatan Kuala Mandor B

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan	Jumlah Pembinaan Pemerintahan Desa	Desa	5,00	5,00	100,00	5,00
		Jumlah Pembinaan Kesejahteraan	Desa	5,00	5,00	100,00	5,00
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Lebih	Pelayanan Kependudukan (E-KTP)	KTP	2.500,00	2.500,00	100,00	2.900,00
		Pelayanan Perizinan	Izin	-	-	-	-
							9
							10
							5,00
							5,00
							2.745,00
							94,66
							-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2014 sebesar Rp. 1.776.651.926,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.640.725.129,00 atau sebesar 92,35%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.073.210.025,00 atau sebesar 96,14% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 567.515.104,00 atau sebesar 85,94%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Raya Tahun 2015 sebesar Rp. 1.888.193.092,00 atau naik sebesar 6,28% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

**2.2.24 Kecamatan Sungai Ambawang**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan Melalui Pelayanan Yang Cepat, Tepat, Dan Data Yang Akurat	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Di Kecamatan	Izin	-	-	-	75,00		
2	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kependudukan	Tersedianya Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan	KTP	-	-	-	7.000,00		
3	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Terbinanya Pemerintah Desa	Desa	-	-	-	15,00		
4	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Sesuai Rencana Dan Kebutuhan Melalui Koordinasi Dan Sinkronisasi	Terbinanya Sosial Kemasyarakatan	Desa	-	-	-	15,00		
5	Meningkatnya Situasi Keamanan Dan Peluang Usaha Semakin Kondusif	Terwujudnya Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Desa	-	-	-	15,00		
		Terwujudnya Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	-	-	1,00		
		Terwujudnya Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban	Desa	-	-	-	15,00		

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014



- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2014 sebesar Rp. 1.989.882.636,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.926.078.623,00 atau sebesar 96,79%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.149.894.118,00 atau sebesar 99,04% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 776.184.505,00 atau sebesar 93,63%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2015 sebesar Rp. 2.035.362.166,00 atau naik sebesar 2,29% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

### 2.2.25 Kecamatan Terentang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Terentang Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Terentang Tahun 2014 sebesar Rp. 1.687.926.851,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.599.341.481,00 atau sebesar 94,75%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.015.645.773,00 atau sebesar 99,90% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 583.695.708,00 atau sebesar 86,96%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Terentang Tahun 2015 sebesar Rp. 1.886.035.66500 atau naik sebesar 11,74% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kecamatan Terentang belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

### 2.2.26 Kecamatan Batu Ampar

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Batu Ampar Tahun 2014 sebesar Rp. 2.197.174.287,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.104.534.532,00 atau sebesar 95,78%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.231.699.263,00 atau sebesar 99,99% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 872.835.269,00 atau sebesar 90,41%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Batu Ampar Tahun 2015 sebesar Rp. 2.241.455.303,00 atau naik sebesar 2,02% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kecamatan Batu Ampar belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

### 2.2.27 Kecamatan Kubu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Kubu Tahun 2014 sebesar Rp. 2.149.640.777,04 dengan realisasi sebesar Rp. 1.930.697.412,00 atau sebesar 89,81%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.224.001.459,00 atau sebesar 99,39% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 706.695.953,00 atau sebesar 76,97%.
- Pagu Anggaran Kecamatan Kubu Tahun 2015 sebesar Rp. 1.892.379.712,00 atau menurun sebesar 11,97% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.
- Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kecamatan Kubu belum menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**2.2.28 Kecamatan Rasau Jaya**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kecamatan	Terlaksananya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00
6	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Pembinaan Ke Desa	Desa	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2014 sebesar Rp. 2.223.478.498,80 dengan realisasi sebesar Rp. 2.108.575.949,00 atau sebesar 94,83%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.371.690.411,00 atau sebesar 98,20% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 736.885.538,00 atau sebesar 89,14 %.
- Pagu Anggaran Kecamatan Rasau Jaya ahun 2015 sebesar Rp. 2.372.215.381,00 atau naik sebesar 6,69% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

**2.2.29 Kecamatan Teluk Pakedai**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		Jumlah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
2	Meningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan Organisasi Desa di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Teluk Pakedai	KTP	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3	Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Kecamatan	Jumlah Pembinaan Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Teluk Pakedai	Desa	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		Jumlah Pelayanan Perizinan di Kecamatan Teluk Pakedai	Izin	10,00	10,00	100,00	11,00	11,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2014 sebesar Rp. 1.967.757.634,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.855.974.702,00 atau sebesar 94,32%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.178.979.459,00 atau sebesar 97,71% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 676.995.243,00 atau sebesar 88,95 %.

- Pagu Anggaran Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2015 sebesar Rp. 2.127.348.462,00 atau naik sebesar 8,11% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.



### 2.2.30 Kecamatan Sungai Kakap

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Melalui Pelayanan Yang Cepat dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Pemerintahan Desa Jumlah Pelayanan Kependudukan Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Desa KK Desa	13,00 1.600,00 13,00	13,00 1.550,00 13,00	100,00 96,88 100,00	13,00 1.700 13,00	13,00 1.675 13,00	100,00 98,53 100,00
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sesuai Rencana dan Kebutuhan Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Pelayanan Perizinan Jumlah Pembinaan Ekonomi Pembangunan	Izin Desa	50,00 13,00	59,00 13,00	118,00 100,00	60,00 13,00	72,00 13,00	120,00 100,00
3	Meningkatkan Situasi Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Desa	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2014 sebesar Rp. 2.812.270.923,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.653.805.255,00 atau sebesar 94,37%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.432.003.159,00 atau sebesar 99,14% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.221.802.096,00 atau sebesar 89,32 %.

- Pagu Anggaran Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2015 sebesar Rp. 2.622.904.506,00 atau menurun sebesar 6,73% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

### 2.2.31 Dinas Pendapatan Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						9	10

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
- Tahun 2015 Dinas Pendapatan menjadi SKPD tersendiri yang sebelumnya bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**2.2.32 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pedesaan Yang Aktif dan Produktif	PKK	115,00	117,00	101,74	117,00	117,00	100,00
			LPM	115,00	117,00	101,74	-	-	-
			Posyantek	3,00	2,00	66,67	3,00	2,00	66,67
2	Peningkatan Ketertiban Administrasi Kelurahan	Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi	Desa	110,00	102,00	92,73	117,00	110,00	94,02
3	Penyelesaian Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Penetapan Tapal Batas Desa	Patok	31,00	9,00	29,03	31,00	29,00	93,55
4	Penyaluran Dana Desa	Jumlah Desa Yang Mencairkan Dana Desa	Tahap 1	110,00	105,00	95,45	117,00	115,00	98,29
			Tahap 2	110,00	101,00	91,82	117,00	108,00	92,31

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 sebesar Rp. 3.981.091.887,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.900.820.200,00 atau sebesar 97,98%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.620.510.565,00 atau sebesar 99,25% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.280.309.635,00 atau sebesar 97,10 %.

- Pagu Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 sebesar Rp. 4.472.582.340,00 atau naik sebesar 12,35% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

**2.2.33 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penelusuran Situs-Situs Bersejarah di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Khasanah Arsip Kerajaan Jumlah Arsip Statis Yang Dirawat dan Di Restorasi Jumlah Arsip Pilkada Tahun 2008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Daerah	Berkas Berkas Berkas Kegiatan	50,00 50,00 50,00 1,00	10,00 4,00 42,00 1,00	20,00 8,00 84,00 100,00	50,00 50,00 50,00 1,00	10,00 4,00 42,00 1,00	20,00 8,00 84,00 100,00
2	Pengkajian dan Pengembangan Arsip	Jumlah Juklak dan Juknis Kerasipan Jumlah Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jenis Kegiatan	3,00 1,00	1,00 1,00	33,33 100,00	3,00 1,00	1,00 1,00	33,33 100,00
3	Pemantapan Intensitas Kampanye/ Sosialisasi Melalui Media Massa	Jumlah Naskah Sumber Arsip Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/ Penyuluhan Kerasipan Terselenggaranya Kampanye/ Sosialisasi Media Massa	Berkas Orang Kegiatan	40,00 50 1,00	71,00 50 1,00	177,50 100,00 100,00	40,00 50 1,00	60,00 50 1,00	150,00 100,00 100,00
4	Perbaikan Pelayanan/ Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	Terealisasinya Minat dan Budaya Baca Terealisasinya Pencanangan Kubu Raya Membaca	Kegiatan Kegiatan	1,00 1,00	1,00 1,00	100,00 100,00	- -	- -	- -
5	Penambahan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Pengadaan Buku Koleksi Umum Untuk Perpustakaan Daerah	Buku	500,00	956,00	191,20	700,00	1.332,00	190,29

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepustakaaan	Terealisasinya Operasional Mobil Keliling dan Mobil Pintar	Unit	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.496.529.578,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.415.993.417,00 atau sebesar 94,62%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 707.047.346,00 atau sebesar 93,67% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 708.946.071,00 atau sebesar 95,59 %.

- Pagu Anggaran Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 2.022.565.331,00 atau naik sebesar 35,15% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.34 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terbentuknya Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bagi Masyarakat Luas	<p>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat informasi</p> <p>Tersedianya Operasional Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustaka)</p> <p>Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi, Informasi Wilayah KKR</p> <p>Terlaksananya Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Rangka Kontribusi Menara Telekomunikasi</p>	<p>Kelompok</p> <p>Bulan/Kec</p> <p>Kec</p> <p>SKPD</p> <p>Kec</p> <p>Menara</p> <p>SKPD</p>	3,00	4,00	133,33	4,00	5,00	125,00
2	Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Terlaksananya Bimtek Penggunaan Email server@kuburayakab.go.id di Pemkab Kubu Raya</p>	SKPD	-	-	-	29,00	29,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik ( <i>e-procurement</i> )	Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Server	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00
		Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE Kuburayakab.go.id	Peralatan Penunjang LPSE	10,00	5,00	100,00	4,00	4,00	100,00
		Tersedianya Penguatan Operasional Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kubu Raya	Paket Lelang	203,00	203,00	100,00	500,00	340,00	68,00
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi Program Kebijakan Pembanguan Kabupaten Kubu Raya	Tersedianya Pengembangan Sistem Aplikasi Surat Elektronik di Pemkab Kubu Raya	Aplikasi	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government	Buku	-	-	-	1,00	-	0,00
		Tersedianya Penguatan Web. kuburaya.go.id dan Web.diskominfo	Berita	300,00	300,00	100,00	600,00	626,00	104,33
		Tersedianya Pengembangan Media Center	Liputan/Berita	-	-	-	350,00	565,00	161,43

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 sebesar Rp. 9.705.380.022,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.598.444.192,00 atau sebesar 88,59%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.496.453.720,00 atau sebesar 98,22% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.101.990.472,00 atau sebesar 86,80 %.



- Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebesar Rp. 4.507.582.364,00 atau menurun sebesar 53,56% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.35 Dinas Pertanian dan Peternakan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan	Meningkatnya Produktivitas Padi	Ton	225.000	217.912	96,85	245.936	207.545	84,39
		Meningkatnya Produktivitas Padi	Ku/Ha	37,50	34,26	91,36	35,75	34,26	95,83
		Meningkatnya Produktivitas Jagung	Ton	21.000,00	11.918	56,75	-	-	-
		Meningkatnya Produktivitas Jagung	Ku/Ha	33,50	29,10	86,87	-	-	-
		Meningkatnya Produktivitas Kedelai	Ton	300,00	63,00	21,00	-	-	-
		Meningkatnya Produktivitas Kedelai	Ku/Ha	13,70	11,94	87,15	-	-	-
		Produksi Kacang Hijau	Ton	72,00	-	0,00	-	-	-
		Produktivitas Kacang Hijau	Ku/Ha	7,80	-	0,00	-	-	-
		Produksi Ubi Kayu	Ton	23.208,00	-	0,00	-	-	-
		Produksi Ubi Jalar	Ton	4.858,00	-	0,00	-	-	-
		Produktivitas Ubi Jalar	Ku/Ha	85,25,00	-	0,00	-	-	-
		Produksi Kacang Tanah	Ton	227,00	-	0,00	-	-	-
		Produktivitas Kacang Tanah	Ku/Ha	11,70	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Sayuran	Ton	25.900	545.403	2.105,80	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Pisang	Ku	1.051.000	448.684	42,69	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Langsat	Ku	2.628,00	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Nanas	Ku	54.600,00	464.137,00	850,07	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Pepaya	Ku	965,00	23.834,00	2.469,84	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Produksi Durian	Ku	32.878,00	17.460,00	53,11	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Rambutan	Ku	18.957,00	5.483,00	28,92	-	-	-
		Bertambahnya Luas Areal Komoditas Nanas	Ha	2.055,00	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Pepaya	Ku	965,00	23.834,00	2.469,84	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Durian	Ku	32.878,00	17.460,00	53,11	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Rambutan	Ku	18.957,00	5.483,00	28,92	-	-	-
		Bertambahnya Luas Areal Komoditas Nanas	Ha	2.055,00	-	0,00	-	-	-
		Bertambahnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak	Ha	20,00	-	0,00	-	-	-
		Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Ekor	16.847,00	14.309,00	84,94	19.223,00	14.720,00	76,57
		Peningkatan Populasi Ternak Babi	Ekor	32.165,00	35.825,00	111,38	36.792,00	36.813,00	100,06
		Meningkatnya Populasi Ayam Buras	Ekor	2.951.638	887.037,00	30,05	2.457.901	2.559.852	104,15
		Meningkatnya Populasi Ayam Ras	Ekor	1.570.704	1.023.383	65,15	5.185.166	7.281.423	140,43
		Meningkatnya Populasi Kambing	Ekor	37.304,00	25.502,00	68,36	46.759,00	28.545,00	61,05
		Meningkatnya Populasi Itik	Ekor	56.576,00	48.703,00	86,08	68.961,00	56.982,00	82,63
		Peningkatan Produksi Ternak Sapi	Ton	70,54,00	257,00	364,33	-	-	-

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Produksi Ternak Babi	Ton	49,44	333,00	673,54	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Ayam Buras	Ton	2.901,43	164,00	5,65	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Ayam Ras	Ton	2.898,13	237,00	8,18	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Kambing	Ton	30,64	47,43	154,80	-	-	-
		Meningkatnya Produksi Itik	Ton	2,07	6,03	291,30	-	-	-
2	Meningkatkan Produktivitas Pangan Melalui Pemanfaatan Teknologi	Meningkatnya Penggunaan Alat dan mesin Pertanian	Unit	895,00	167,00	18,66	700,00	731,00	104,43
		Jumlah Kelompok yang Terbina	Kelompok	75,00	-	0,00	748,00	331,00	44,25
		Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani	Orang	10,00	-	0,00	1.400,00	600,00	42,86
3	Mengoptimalkan Kegiatan Kemitraan untuk Memantapkan Prasarana dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pameran/Promosi Produk Pertanian Kawasan Agribisnis Terpadu	Kali	-	-	-	8,00	4,00	50,00
			Ha	-	-	-	500,00	-	0,00
4	Pengembangan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Keragaman Sumberdaya Lahan dan Air Melalui Pengelolaan Lahan dan Air Secara Berkelanjutan	Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan	Ha	-	-	-	68.791,00	59.945	87,14
		Meningkatnya Perluasan Areal Tanam	Ha	1.500,00	-	0,00	-	-	-
		Bertambahnya Luas Kawasan Rice Estate	Ha	200,00	-	0,00	-	-	-
		Meningkatnya Pembangunan Jaringan Irigasi	Ha	1.375,00	-	0,00	-	-	-

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi	Ha	2.850,00	-	0,00	3.000,00	113,00	3,77
		Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru	Ha	3.500,00	-	0,00	-	-	-
		Legalisasi Kelembagaan P3A	Paket	2,00	-	0,00	-	-	-
		Optimalisasi Lahan Pertanian	Ha	-	-	-	1.000,00	-	0,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2014 sebesar Rp. 23.205.652.160,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.456.143.263,00 atau sebesar 92,62%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.236.325.474,00 atau sebesar 96,01% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 18.219.817.789,00 atau sebesar 91,86 %.
- Pagu Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2015 sebesar Rp. 20.320.733.430,00 atau menurun sebesar 12,43% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.36 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Profesionalisme Kelembagaan dan SDM Masyarakat	Jumlah Penyuluh Swadaya: - KTNA - Pendamping Penas - P4S - PKSM - KTNA - Poktan - Gapoktan	Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok	- - 5,00 - - - -	- - 5,00 - - - -	- - 100,00 - - - -	26,00 9,00 5,00 10,00 30,00 1.224,00 125,00	28,00 9,00 5,00 10,00 40,00 1.224,00 125,00	107,69 100,00 100,00 100,00 133,33 100,00 100,00
2	Meningkatnya Profesionalisme Kelembagaan dan SDM Penyuluh	Jumlah Penyuluh Swadaya: - PPL Peserta Bimtek - Penyuluh Berprestasi - PPL Yang Di Supervisi - PPL Peningkatan Kerja - PPL Penyusun Program - Petani PLTB - Operasional BP3K - Petani Lateks - Kajian BP3K - Petani Gaharu - Petani Mangrove	Orang Orang Orang Orang Orang Petani Ops Petani Kajian Petani Petani	- -	- -	- -	98,00 9,00 95,00 95,00 95,00 60,00 9,00 30,00 9,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00	100,00 9,00 95,00 95,00 95,00 60,00 9,00 32,00 9,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00	102,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,67 100,00 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67
3	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kelompok Tani/Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana: - Kawasan Agribisnis	Kec	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- PPL		Orang	-	-	-	2,00	2,00	100,00
	- Petak KJA		Petak	-	-	-	8,00	8,00	100,0
	- PPL		Orang	-	-	-	15,00	15,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BP4K Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 sebesar Rp. 11.023.903.298,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.742.843.169,00 atau sebesar 97,45%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.101.719.980,00 atau sebesar 98,66% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.641.123.189,00 atau sebesar 95,17 %.
- Pagu Anggaran Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 sebesar Rp. 20.320.733.430,00 atau naik sebesar 14,31% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.



**2.2.37 Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan Kapasitas Perkembangan Kelembagaan IUPHHK Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT Pembinaan Teknis, Monitoring dan Rekonsiliasi PNBK Pembangunan/Pengayakan Potensi HHBK dan Produk Unggulan Pembangunan HTR	%	100,00	78,81	78,81	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya	%	100,00	93,48	93,48	100,00	96,62	96,62
3	Meningkatnya Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	%	100,00	93,77	93,77	100,00	98,33	98,33
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Bidang Kehutanan, Kehutanan dan Pertambangan	Pembinaan dan Identifikasi Kerusakan Hutan Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	%	100,00	63,21	63,21	100,00	98,33	98,33
			%	100,00	82,37	82,37	100,00	58,28	58,28

PR 212

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi	%	100,00	99,97	99,97	-	-	-
		Penyusunan Data Base Peta Geologi dan Sumberdaya Mineral	%	100,00	96,98	96,98	100,00	95,71	95,71

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2014 sebesar Rp. 17.312.616.203,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.181.660.434,00 atau sebesar 93,47%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.695.536.177,00 atau sebesar 96,20% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.486.124.257,00 atau sebesar 91,12 %.
- Pagu Anggaran Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2015 sebesar Rp. 15.844.679.387,00 atau menurun sebesar 8,48% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

### 2.2.38 Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013		2014			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Tercapainya Peningkatan Pruduksi Budidaya	Ton	1.684,00	2.366,80	140,55	1.852,00	2.802,72	151,33
2	Optimalisasi Produksi Sumberdaya Perikanan Tangkap Secara Terkendali	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.567,00	19.761,60	135,66	14.713,00	23.730,30	161,29
3	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Serta Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran	Unit	38,00	162,00	426,32	42,00	90,00	214,29
4	Menurunkan Tingkat Pelanggaran Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Serta Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir Meningkatkan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	Unit Kelompok	66,00 9,00	22,00 12,00	33,33 133,33	72,00 10,00	34,00 14,00	47,22 140,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 sebesar Rp. 15.670.848.535,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.782.183.126,00 atau sebesar 94,33%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.348.290.490,00 atau sebesar 98,45% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.397.892.636,00 atau sebesar 93,58 %.

- Pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp. 12.041.722.413,00 atau menurun sebesar 23,16% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

2.2.39 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Industri Kecil dan Menengah	Unit		27,00		30,00	30,00	100,00
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya	Unit Usaha				30,00	20,00	66,67
2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan Kemampuan Teknologi Industri	Unit		18,00		30,00	25,00	83,33
3	Penataan Struktur Industri	Tertatanya Struktur Industri	%		20,00		15,00	15,00	100,00
4	Pengembangan Sentra-Sentra Industri	Laju Pertumbuhan Industri	%		12,00		20,00	15,00	75,00
5	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah BPSK Kabupaten Kubu Raya Jumlah Kegiatan Fasilitas, Pelatihan dan Edukasi Serta Penyebaran Informasi	Unit Kegiatan	-	-	-	1,00	-	0,00
		Barang yang Diawasi	Jenis	-	20,00	-	25,00	25,00	100,00
		Akumulasi Jumlah PPNS-PK dan PPBJ	Orang	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00
6	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Jumlah Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Ekspor dan Impor yang Dilayani		-	-	-	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2013			2014		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Daerah	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Keg	-	18,00	-	20	20	100
8	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terselenggaranya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kali	-	-	-	-	-	-
9	Pengembangan Kelembagaan PKL	Terbentuknya Sebuah Atau Beberapa Lembaga Bagi PKL dan Pedagang	Lembaga	-	-	-	-	-	-
10	Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pedagang	Database Potensi Pedagang Yang Dinamis	Database	-	-	-	-	-	-
11	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	UTTP	-	605,00	-	650,00	673,00	103,54
		Jumlah Kompetensi Pengujian Dari SDM Metrologi	Kompe- tensi	-	9,00	-	9,00	-	0,00
		Data Base Kemetrolgian	Kec	-	-	-	9,00	9,00	100,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

- Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 sebesar Rp. 5.218.642.187,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.696.427.473,00 atau sebesar 89,99%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.722.600.527,00 atau sebesar 94,26% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.973.826.946,00 atau sebesar 87,69 %.

Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015 sebesar Rp. 8.336.976.530,00 atau naik sebesar 59,75% dari Pagu Anggaran Tahun 2014.

Jumlah keseluruhan Pagu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebesar Rp. 1.109.513.591.138,24 dengan realisasi sebesar Rp. 1.024.090.695.452,87 atau sebesar 92,30%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 493.222.571.957,00 atau sebesar 97,32%, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 536.542.663.594,00 atau sebesar 89,02%. Sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp. 1.197.204.323.695,00 atau naik sebesar 7,90% dari Pagu SKPD Tahun 2014.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Urusan Pendidikan**

Permasalahan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga pendidik masih yang kurang di daerah pesisir atau terpencil baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK berdampak pada penangkapan pada bidang studi yang diajarkan;
- 2) Anggaran yang belum mencukupi berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan lomba siswa dan pendidik demi peningkatan kualitas pendidik baik ditingkat Kabupaten, provinsi maupun internasional;
- 3) Masih banyaknya gedung sekolah yang rusak terutama SD, kurang USB/RKB untuk SMP dan SMA/SMK;
- 4) Belum dilakukan analisis/ kajian dari aspek terkait beban kerja, aspek SDM, keuangan, serta prioritas visi dan misi;
- 5) Terdapat aparatur yang belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan terkait penempatannya.

### **2.3.2 Urusan Kesehatan**

Permasalahan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih Kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- 2) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta minimnya prasarana pendukung.
- 4) Masih adanya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan derajat kesehatan seperti kematian dan yang berhubungan dengan persalinan, masih terjadinya lonjakan penyakit seperti Demam berdarah pada Tahun 2014.

### **2.3.3 Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penanganan terhadap potensi Sumber Daya Alam yang ada;
- 2) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- 3) Lemahnya/rendahnya kapasitas dan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan SPM salah satu belum masuk rencana Kerja Kerja yang telah ditetapkan, yaitu terkait dengan parameter penelitian kerusakan tanah akibat kegiatan pertanian, perkebunan dan hortikultura;
- 5) Gedung dan SDM Laboratorium Daerah belum ada, sementara sarana dan prasarana berupa kendaraan dan peralatan laboratorium dari anggaran DAK dan APBD Kabupaten Kubu Raya telah tersedia dan disimpan diruangan kantor Badan Lingkungan Hidup yang belum maksimal difungsikan.

#### **2.3.4 Urusan Pekerjaan Umum**

Permasalahan yang dihadapi adalah :

##### **A. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan**

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- 2) Koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
- 3) Kondisi jalan lingkungan kualitasnya masih rendah berupa jalan tanah/kerikil dalam kondisi rusak, kondisi jembatan/gertak yang ada masih memprihatinkan, sebagian besar belum memiliki jembatan yang layak untuk dilewati.
- 4) Pelayanan jaringan air bersih masih sangat terbatas dengan tingkat pelayanan dan kualitas yang masih sangat terbatas.
- 5) Volume sampah semakin besar.
- 6) Keterbatasan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah. TPA yang ada saat ini di Rasau Jaya dengan luas lahan 3,4 Ha sudah sangat tidak memadai.
- 7) ~~Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka melaksanakan tugas, seperti Keterbatasan jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah. Kondisi saat ini hingga Tahun 2014 jumlah dump truck sebanyak 6 unit, truck arm roll sebanyak 3 unit, semua armada tersebut dalam kondisi baik, namun untuk mengangkut seluruh volume sampah di Kabupaten Kubu Raya masih perlu penambahan armada.~~
- 8) Penerangan jalan umum masih sangat terbatas.

## B. Dinas Bina Marga dan Pengairan

### 1) Pengembangan Kabupaten Kubu Raya

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan.

Pengembangan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan selama ini dirasakan belum optimal. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Kondisi awal saat pemekaran wilayah Kabupaten, jaringan jalan dan jembatan yang tersedia dalam kondisi rusak dan belum memiliki perkerasan;
- b. Panjang jalan yang belum sesuai dengan sebaran penduduk dan sistem aktivitas yang padat;
- c. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi sehingga mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat
- d. Sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah rawan banjir dan diperlukan konstruksi jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) agar kualitas jalan lebih tahan lama, namun konstruksi jalan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible pavement)/aspal.

### 2) Banjir

Banjir merupakan salah satu permasalahan akibat jaringan drainase dan saluran yang belum memadai di bidang kebinamargaan dan pengairan. Permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan :

- a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting yang diakibatkan oleh penyempitan saluran drainase dan sedimentasi pada saluran sungai;
- b. Pendangkalan dan penyempitan saluran ( Sungai );

- c. Belum terintergrasinya sistem jaringan drainase dari satu kawasan lainnya;
  - d. Naiknya koefisien aliran, akibat berkurangnya daerah resapan.
- 3) Keawetan Konstruksi Jalan
- Pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sebagian besar masih menggunakan metode manual sehingga hasilnya kurang sempurna baik terhadap kualitas dan umur konstruksi dibanding bila dilaksanakan dengan metode mekanis, sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat ketahanan konstruksi.
- 4) Daerah Perbatasan Antar Wilayah
- Daerah perbatasan antar wilayah, khususnya yang transportasinya dilayani dengan jalan lokal masih merupakan wilayah yang kurang mendapat porsi penanganan yang memadai dikarenakan sebagian besar daerah ini merupakan daerah yang belum berkembang. Dalam upaya mengembangkan pola pergerakan yang efisien dan bagian dari proses pemerataan pembangunan, daerah ini harus mendapat perhatian khusus.
- 5) Sungai
- Selama ini paradigma sungai sebagai bagian paling belakang dan kurang diperhatikan estetikanya. Paradigma ini harus diubah dan harus memperhatikan factor estetika dan sanitasi lingkungan sehingga dapat mendukung sektor pariwisata.
- 6) Masalah Sempadan Sungai
- Bangunan-bangunan liar di sempadan sungai merupakan penyebab kekumuhan dan gangguan aliran sungai. Pengumpulan (konglomerasi) permukiman kumuh banyak dimulai dari dua daerah ini. Membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganan kota karena sungai merupakan potret dari sebuah peradaban masyarakat kota.

#### 7) Penggundulan Daerah Aliran Sungai

Kawasan terbuka di Daerah Aliran Sungai (DAS) harus sesegera mungkin untuk dihijaukan. Daerah Aliran Sungai yang gundul akan menimbulkan erosi dan pengikisan daerah tepian sungai sehingga terjadinya sedimentasi akibat erosi dan gerusan aliran sungai serta terjadinya pendangkalan badan sungai tersebut. Disamping itu, Daerah Aliran Sungai yang gundul juga akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat dan proses konsentrasi air di sungai lebih singkat dengan debit aliran yang lebih besar.

### 2.3.5 Urusan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tata bangunan dan lingkungan yang harmonis, serasi dan berkelanjutan;
- 2) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- 3) Masih sangat terbatasnya perangkat regulasi operasional dan sumber daya manusia dalam perizinan bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Masih rendahnya kendali aparat dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- 5) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya tanpa memiliki IMB;
- 6) Belum terjamahnya taman – taman kota, dan pemakaman yang ada, secara memadai, layak dan terjadwal.

### 2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan serta tantangan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan kebijakan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- 2) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);

- 3) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- 4) Kompetensi SDM perencana belum optimal;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 7) Belum lengkapnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
- 8) Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- 9) Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena SKPD belum menyampaikan laporan tepat waktu;
- 10) Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan;
- 11) Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

### **2.3.7 Urusan Perumahan**

Permasalahan Urusan Perumahan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik, dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sangat minim, diantaranya ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan umum;
- 2) Masih banyaknya jumlah rumah tradisional masyarakat dalam kondisi yang tidak layak huni dan memerlukan pembenahan/penataan.

### 2.3.8 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

#### A. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor:

- 1) Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga terkait dengan pembinaan generasi muda;
- 2) Kurangnya minat peserta dalam mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten dikarenakan tidak dilaksanakannya seleksi setiap Tahun.

#### B. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan seleksi serta pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka) Tingkat Kabupaten;
- 2) Alokasi dana untuk kegiatan seleksi dan pemusatan latihan paskibra belum optimal;
- 3) Pihak sekolah sebagai sumber rekrutmen calon anggota paskibraka hendaknya melaksanakan seleksi tingkat sekolah sebelum dikirim ketingkat Kabupaten.

Handwritten notes in blue ink, possibly initials or a signature, located to the right of the text in section B.

#### C. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi POPDA:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang terpusat dalam suatu kawasan sehingga beberapa cabang olahraga dilaksanakan di kota Pontianak.

#### D. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan TC serta Pengiriman Kontingen Kejurda:

- 1) Minimnya anggaran untuk memberi penghargaan kepada atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah;
- 2) Penghargaan belum bisa diberikan kepada atlet yang berprestasi.;
- 3) Masih lemahnya organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kubu Raya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu pengembangan olahraga.

**E. Kegiatan Pemilihan Bhakti Pemuda Antar Provinsi/Jambore Pemuda Indonesia:**

- 1) Minimnya peserta untuk mengikuti seleksi;
- 2) Tim seleksi belum memiliki buku panduan sebagai standar.

**F. Kegiatan Hari Olahraga Nasional:**

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga sehingga tempat kegiatan dilaksanakan di aula kantor Bupati dan masih dalam tahap perbaikan.

**G. Kegiatan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Tinju (Ring Tinju):**

- 1) Sarana dan prasarana olahraga cabang olahraga tinju yaitu berupa matras dan ring tinju, dikarenakan lamanya proses pengadaan dan Tekhnis Laporan serta dekatnya waktu penutupan kas akhir Tahun Daerah;
- 2) Tidak Bisa diserap karena pihak ketiga mengalami masalah teknis.

**2.3.9 Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya Peta Investasi;
- 2) Belum terjaringnya jumlah investasi secara riil;
- 3) Belum tersedianya buku neraca investasi daerah;
- 4) Penyelesaian izin melalui spipise yang masih terlambat.

**2.3.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggaran :

Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

- a) Belanja Jasa Administrasi Keuangan
- b) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
- c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

- e) Penyediaan makan dan minum rapat
- f) Pengadaan peralatan gedung kantor
- g) Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
- h) Pengadaan mebeleur
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Kondisi SDM

SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, karena pada Sekretariat dan Bidang masih ada yang belum mempunyai staf, sehingga masih banyak memerlukan tenaga honorer, disamping itu pengetahuan teknis PNS masih terbatas.

### 2.3.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1) Tenaga

Untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tenaga operator yang bertugas melayani pembuatan KTP, KK, dan Akta Pencatatan Sipil. Jumlah tenaga sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 13 orang Pejabat Struktural. Jumlah tenaga operator yang ada saat ini masih belum ideal untuk mencukupi kebutuhan pelayanan yang maksimal terhadap sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, juga terjadi kekurangan tenaga pengadministrasian umum, pulahta kepegawaian, dan arsiparis untuk membantu kelancaran administrasi surat-menyurat maupun kepegawaian.

2) Dana

Untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terkendala keterbatasan dana. Dana yang dimiliki anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ke sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.



3) Sarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki keterbatasan belum memiliki gedung kantor. Keberadaan gedung kantor saat ini merupakan gedung sewa berupa ruko. Sarana lain yang sangat diperlukan adalah kendaraan operasional untuk kegiatan pelayanan keliling yang dapat menjangkau kecamatan dan desa.

4) Network

Jaringan SIAK online yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini adalah jaringan yang dipinjamkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk jaringan online ke sembilan Kecamatan di Kab. Kubu Raya menggunakan jaringan milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya.

### 2.3.12 Urusan Ketenagakerjaan

~~Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:~~

- 1) Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar dan belum adanya data ril Ketenagaaan kerjaan yang valid.

### 2.3.13 Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan data base Ketahanan Pangan untuk penyusunan Renstra pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kubu Raya masih belum sempurna;
- 2) Penyusunan data base potensi produksi pangan masih belum sempurna;
- 3) Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan (tingkat Kabupaten dan Kecamatan) belum dapat terlaksana dengan baik;
- 4) Pemanfaatan perkarangan sebagai sumber bahan pangan lokal belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat;
- 5) Sosialisasi terhadap pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif ( pada hari pangan sedunia) belum secara menyeluruh di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya;

- 6) Belum semua program kegiatan pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan terbatasnya SDM dan dana yang tersedia;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, sehingga terhambatnya proses penyelesaian kegiatan, administrasi dan teknis di lapangan;
- 8) Untuk program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya bersumber dari dana Dekonsentrasi Provinsi Kalbar (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik sedangkan dana APBD kegiatannya berupa pembinaan dan pendampingan non fisik;
- 9) Perlunya dana sharing dari APBD dalam mendukung program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, pada kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat, Desa Mandiri Pangan serta Daerah Rawan Pangan terutama dalam pembinaan dan evaluasi; serta penguatan modal kelompok yang sudah berjalan;
- 10) Perlu adanya keberpihakan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebanyak 100 ton ekuivalen setara beras untukantisipasi bencana alam, banjir musim paceklik dan gagal panen.

#### **2.3.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terbentuknya Unit Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan;
- 2) Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional;
- 3) Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD terkait cakupan Indikator rehabilitasi sosial, walaupun TIM jejaring telah terbentuk;
- 4) Terbatasnya anggaran yang tersedia atau belum tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Belum adanya sarana atau shelter untuk penampungan korban;

- 6) Sulitnya melakukan pengumpulan data, dikarenakan data yang dibutuhkan terkait dengan Kejaksaan Negeri, pengadilan Negeri dan Polres yang keberadaannya diluar wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- 7) Adanya 2 (dua) Polres pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPPA Polres Kota dan UPPA Polres Pontianak di Mempawah).

#### **2.3.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB khususnya dalam penggunaan KB MKJP;
- 3) Masih kurangnya penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang dibiayai oleh APBD;
- 4) Masih kurangnya media luar ruang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang KB KS;
- 5) Masih kurang terkoordinirnya sistem pelaporan dari desa dan Kecamatan.

M  
R  
K

#### **2.3.16 Urusan Perhubungan**

Permasalahan Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya tenaga PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
- 3) Kesadaran PNS dalam melaksanakan Tupoksi belum optimal;
- 4) Pengawasan berjenjang dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
- 5) Fungsi koordinasi diantara Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
- 6) Terbatasnya Anggaran SKPD.

### 2.3.17 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Bandwith di Kominfo hanya 5 MB, sedangkan kebutuhan untuk melayani SKPD dan Kecamatan se-Kab Kubu Raya kurang lebih 50 MB;
- 2) Konektivitas jaringan antara SKPD tidak terkoneksi dengan baik;
- 3) Kurangnya fasilitas ruangan maintenance server dan sistem LPSE;
- 4) Kurangnya tenaga operator pengelolaan website Kubu Raya;
- 5) Kementerian Kominfo tidak melakukan koordinasi dalam mendistribusikan PLIK dan PLIK wifi di Kab. Kubu Raya;
- 6) Kekuatan sinyal program Teleinfo tuntas dari Kementerian Kominfo di Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya kurang maksimal sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat;
- 7) Perubahan SPK MPLIK dari PT. WEB terhadap pembiayaan membingungkan karena anggaran yang sudah terealisasi tak bisa digunakan, karena pasal pada SPK yang baru tidak memperbolehkan biaya operasional dibebankan pada APBD.

### 2.3.18 Urusan Pertanahan

Permasalahan Urusan Pertanahan adalah lambatnya penyelesaian penerbitan sertipikat hak pakai selama dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dikarenakan masalah personil seksi pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang terbatas dan alas hak atas tanah yang tidak ada sehingga sulit untuk mengajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

### 2.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Personalia terbatas (8 orang) berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang;
- 2) Terbatasnya sarana/prasarana kerja berdampak pada kecepatan dan ketepatan waktu kerja.

### **2.3.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

#### **1. Bagian Pemerintahan**

Permasalahan Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya segmen batas antar daerah dan segmen batas wilayah kecamatan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, SDM yang memiliki kemampuan teknis serta waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- 3) Penegasan Batas Wilayah antar Daerah harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 4) Kesulitan dalam memperoleh data dari SKPD sebagai bahan penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 dan Memori Bupati Kubu Raya Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 serta batas batas waktu yang diberikan dalam penyampaian dokumen-dokumen tersebut;
- 5) Kesulitan dalam memperoleh data sebagai syarat kelengkapan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Pemekaran / Pembentukan Kecamatan;
- 6) Belum terakomodir Program/Kegiatan dan anggaran fasilitasi kegiatan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Unsur Alami pada TA. 2013.

*Handwritten notes in blue ink:*  
u  
n  
f  
f

#### **2. Bagian Hukum dan HAM**

Permasalahan Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana tempat penyimpanan arsip/produk hukum;
- 2) Tidak tersedianya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan didaerah yang jauh;
- 3) Kurangnya fasilitas komputer, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan computer (komputer yang ada dalam keadaan rusak).

### 3. **Bagian Umum**

Permasalahan Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggaran yang dibutuhkan belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai program yang diminta;
- 2) Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang berada di Bagian Umum belum sesuai dengan kebutuhan terutama untuk penata taman, pramusaji baik di rumah Bupati dan Wakil Bupati maupun di lingkungan Kantor Bupati, serta untuk operator komputer;
- 3) Sarana dan prasarana untuk ruangan kami belum memenuhi standar, ruangan yang belum layak bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan dalam melaksanakan tugas sering mendapatkan hambatan.

### 4. **Bagian Administrasi**

Permasalahan Bagian Administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) ~~Tenaga honor dan jumlah honor yang dibayarkan bagi tenaga kerja non PNS di lingkungan Setda Kabupaten Kubu Raya masih belum mendekati UMP Provinsi Kalbar;~~
- 2) Masih adanya unit kerja tertentu / bagian jika mengirim surat menyurat tidak melewati bagian TU dan kepegawaian Bagian Administrasi;
- 3) Data yang diberikan oleh unit kerja / bagian masih belum valid sehingga menghambat penyelesaian penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 4) Anggaran untuk pemeliharaan rutin/berkala sistem komputerisasi dan santel sangat kurang;
- 5) Belum diberikan bimbingan teknis penataan arsip bagi pegawai di bagian administrasi.

### 5. **Bagian Organisasi**

Permasalahan Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan analisis jabatan (Anjab) serta masih kesulitan dalam menyusun Anjab;

- 2) Masih beberapa SKPD yang belum/terlambat dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja sehingga mempersulit dalam menyusun LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Renstra SKPD yang masih pada tahap verifikasi;
- 4) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara lengkap dan menyeluruh;
- 5) Ada beberapa SKPD yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan**

Permasalahan Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional kerja;
- 2) Masih kurang tanggapnya SKPD dalam melaporkan pelaksanaan program dan kegiatannya dan koordinasi antara instansi terkait belum optimal;
- 3) Belum tersedianya dukungan database dan sistem informasi monitoring dan evaluasi dalam menyajikan data pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian dan pembangunan.

#### **7. Bagian Kesejahteraan Sosial**

Permasalahan Bagian Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;
- 2) Perlu penambahan dan perbaikan peralatan pendukung seperti Komputer PC serta Pengadaan Sistem Komputerisasi Data Base Hibah dan Bansos dengan tujuan keakuratan data dan meminimalisir kesalahan dalam hal pemberian bantuan sosial dan hibah.

## **8. Bagian Hubungan Masyarakat**

Permasalahan Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 ini masih terbatas, sehingga untuk melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Bagian Humas masih belum dapat optimal;
- 2) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;
- 3) Perlu peningkatan kualitas SDM pada Bagian Humas dengan memberikan kesempatan mengikuti diklat bidang kehumasan, fotografi, editing dan lainnya;
- 4) Perlu penambahan peralatan pendukung seperti tripod kamera, lampu sorot kamera video, media penyimpanan digital, PC pengelola dan penyimpan data, dan lainnya;
- 5) Perlu kendaraan operasional berupa mobil dinas untuk kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemkab Kubu Raya.

## **9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah**

Permasalahan Urusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan dan tantangan internal
  - a. Sumber daya manusia yang terbatas baik segi jumlah maupun kualitas;
  - b. Sarana dan prasarana pendukung terutama ruang kerja yang belum dapat menampung seluruh pegawai DPPKAD.
- 2) Permasalahan dan tantangan eksternal
  - a. Belum tertib dan belum disiplinnya SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. Adanya peningkatan beban kerja secara signifikan, sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan maupun peningkatan anggaran Pemerintah Kabupaten.



## 10. Sekretariat DPRD

Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2014 sudah memadai, hal ini terkait dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Plapond dan kebijakan Anggaran yang ada walaupun pada kegiatan tertentu ada yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
- 2) Sumber Daya Manusia.  
Kondisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPRD masih kurang terutama pada Bidang Risalah dan Persidangan, sedangkan bagian teknis lainnya yaitu Bagian Umum dan Aparatur serta Keuangan dari jumlah data Kepegawaian yang ada perlu penambahan Personil untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas.
- 3) Sarana dan Prasarana.  
Dari segi sarana dan Prasarana masih perlu ditambah berkaitan dengan kondisi Ruang Sidang dan Ruangan lain dilantai 3 (Tiga) masih terasa sempit atau kurang luas yang mana untuk anggota Fraksi-Fraksi, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Perda belum tertampung pada suatu ruangan yang luas dan memadai.
- 4) Permasalahan Internal dan Eksternal  
Pada dasarnya dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya yang baru maka untuk lingkungan kantor yang ada seperti sekarang dapat kita maklumi hubungan Internal sudah cukup baik dan hubungan dengan pihak luar juga baik, hanya perlu peningkatan pada masa yang akan datang.
- 5) Untuk kantor dibuat pada lokasi yang lebih memadai dan permanen, Kantor DPRD seperti kita lihat pada daerah-daerah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

R  
R  
R  
R

## 11. Inspektorat Daerah

Permasalahan Urusan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian tugas pemeriksaan regular belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sebagaimana telah di atur dalam PKPT;

- 2) Beberapa lokasi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua, terutama pada musim penghujan, sehingga pemeriksaanya ditunda atau belum diperiksa;
- 3) Sarana kendaraan roda empat, roda dua, kendaraan air dan peralatan lainnya (peralatan untuk uji kualitas bangunan/jalan, dll) untuk menunjang tugas kelapangan sangat terbatas/belum tersedia;
- 4) Sarana komputerisasi dirasakan masih sangat terbatas terutama Komputer Jinjing (Laptop) untuk digunakan para pemeriksa dilapangan belum tersedia;
- 5) Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai dan perlu ditingkatkan;
- 6) Obyek pemeriksaan (Objek) kadang-kadang terlambat menanggapi hasil pemeriksaan (temuan) yang disebabkan kurangnya keseriusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya penilaian terhadap kinerja APIP dan keterlambatan pembuatan LHP;
- 7) Lambannya obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Handwritten notes in blue ink, possibly initials or a signature, located on the right margin of the page.

## **12. Badan Kepegawaian Daerah**

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan kepegawaian adalah belum terselesaikannya permasalahan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kubu Raya (CPNS) Tahun 2010 dan hasil seleksi ulang CPNS yang dilaksanakan pada Tahun 2012.

## **13. Satuan Polisi Pamong Praja**

Permasalahan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM, yang memadai baik kualitas maupun kuantitas;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
- 3) Kesejahteraan yang kurang, dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dihadapi;

- 4) Belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah.

#### **14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Permasalahan Urusan Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib;
- 2) Masih kurangnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal;
- 3) Belum terselenggaranya upaya pemenuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Belum terbentuknya system koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten peningkatan kualitas aparatur/SDM serta peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

u  
n  
R  
H

#### **15. Kecamatan Sungai Raya**

Permasalahan Kecamatan Sungai Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, kegiatan.

#### **16. Kecamatan Sungai Kakap**

Permasalahan Kecamatan Sungai Kakap adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil, terbatasnya sumber daya manusia sehingga terkendalanya dalam memproses laporan.
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.

- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## 17. Kecamatan Sungai Ambawang

Permasalahan Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Aparatur

Masih terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada PNS dan masyarakat. Masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan, wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia saat ini belum memadai, seperti peralatan komputer, meubelair, sarana telekomunikasi, dan kendaraan operasional sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pelayanan dan pembinaan kepada PNS dan masyarakat. Masih kurangnya dukungan pengadaan sarana dan prasarana kerja dari pemerintah tingkat atas sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

- 3) Pembiayaan

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Langsung (program dan kegiatan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Tidak Langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### 18. Kecamatan Kuala Mandor B

Permasalahan Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya SDM personil/staf yang dibutuhkan di kecamatan baik secara kuantitas mau pun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan ;
- 3) ~~Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.~~

### 19. Kecamatan Rasau Jaya

Permasalahan Kecamatan Rasau Jaya adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (Personil) yang belum memadai;
- 2) Proses Pelaksanaan Kegiatan maupun penyusunan laporan cenderung lamban sehingga menghambat penyerapan dana anggaran untuk kegiatan dan memperlambat kegiatan;
- 3) ~~Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.~~

### 20. Kecamatan Teluk Pakedai

Permasalahan Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Wilayah  
Keadaan wilayah/medan Kecamatan Teluk Pakedai terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dan sungai, lokasi pemukiman penduduk di sekitar pegunungan cukup jauh, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sungai ~~sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas lapangan~~ dan memerlukan waktu, biaya yang besar, serta tidak semua jenis pertanian/ dapat berkembang dengan baik karena jenis tanah yang terdapat di dataran rendah yaitu gambut.
- 2) Tingkat Pendidikan Masyarakat  
Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama ~~dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan~~

pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Teluk Pakedai.

3) Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja/berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai, seperti jalan, jembatan, listrik, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa sungai Nibung, Desa Kuala Karang, Tanjung Bunga, sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya.

5) Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih relative rendah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil / pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat.

6) Dukungan Pembiayaan, Personil dan Perlengkapan Kerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan pembiayaan, personil dan perlengkapan kerja. Alokasi ketiga faktor tersebut.

- 7) **Batas Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat**  
Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Teluk Pakedai baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi.

#### **21. Kecamatan Kubu**

Permasalahan Kecamatan Kubu adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

#### **22. Kecamatan Terentang**

Permasalahan Kecamatan Terentang adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

#### **23. Kecamatan Batu Ampar**

Permasalahan Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan, listrik yang belum nyala 24 jam dan kelengkapan kerja.

### 2.3.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Anggaran :

Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

- a. Belanja Jasa Administrasi Keuangan
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan makan dan minum rapat
- f. Pengadaan peralatan gedung kantor
- g. Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
- h. Pengadaan mebeleur
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Kondisi SDM

Untuk SDM di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, pada eselon IV kekurangan 2 jabatan struktural yang sampai Desember 2014 belum terisi. Sedangkan jumlah pegawai BPMPD yang berjumlah 23 orang masih dianggap kurang. Untuk mengatasi kekurangan staf tersebut dengan merekrut beberapa tenaga honorer untuk diperbantukan di Sekretariat dan bidang.

3) Lingkungan Internal

Untuk hubungan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya sangat baik dan rasa kekeluargaan.

4) Lingkungan Eksternal

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya untuk koordinasi dengan Legesiatif, antar SKPD Kabpaten, Provinsi dan pusat dalam rangka koordinasi dan konsultasi berjalan baik dan tidak ada permasalahan. Demikian dengan Aparatur Pemerintahan di Desa berlangsung baik dalam



rangka pembinaan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa.

### 2.3.22 Urusan Sosial

Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Sosnakertrans;
- 2) Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang riil di Kabupaten Kubu Raya.

### 2.3.23 Urusan Kebudayaan

Permasalahan Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum terakomodirnya para pekerja seni, budayawan, yang berprestasi sedangkan mereka perlu sebuah penghargaan khusus dari pemerintah setempat;
- 2) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum dapat menampilkan seluruhnya kesenian yang berakar pada tradisi dikarenakan terbentur oleh keterbatasan dana yang dimilikinya. Untuk menampilkan kesenian tradisional berbentuk seni tari dan music tradisional;
- 3) Kurangnya berbagai elemen suku yang berada di Kab. Kubu Raya dalam peran serta pada kegiatan pagejaran lintas budaya dikarenakan keterbatasan waktu yang dinilai kurang siap oleh para paguyuban keluarga besar suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Kurangnya penghargaan yang diperoleh para pelaku seni dan ruang pengapresiasian karya seni yang telah dihasilkan oleh sanggar dan para pekerja seni;
- 5) Budaya dan kesenian tradisional semakin punah, banyak orang mulai melupakan atau bahkan tidak mengetahui ragam seni budaya, maka sesuai program dan kegiatan yang ada di bidang kebudayaan, agar dapat mengenalkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah;
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat akan kekayaan budaya berupa barang peninggalan sejarah dan asset budaya baik benda dan tak benda.

### 2.3.24 **Urusan Statistik**

Permasalahan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Data PDRB dan Kabupaten Dalam Angka belum bisa tersaji pada Tahun berjalan;
- 2) Pemerintah daerah masih tergantung terhadap data-data BPS, dalam kaitanya dengan perencanaan pembangunan daerah tidak semua data dapat disediakan oleh BPS;
- 3) Keterlambatan mitra kerja dalam hal ini BPS dalam menyelesaikan produk pekerjaan;
- 4) Sering terjadi perbedaan data antara BPS dengan SKPD di Pemerintahan Kabupten Kubu Raya;
- 5) Jarangnya sinkronisasi antara BPS dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

### 2.3.25 **Urusan Kearsipan**

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) ~~Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di~~ Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakaan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
- 4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

### **2.3.26 Urusan Perpustakaan**

Permasalahan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakaan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolaian pada arsip dan buku;
- 4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

### **2.3.27 Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2014 telah tercapai, diantaranya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap, pengolahan hasil perikanan serta peningkatan sarana dan prasarana perisisir telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi pencapaian indikator kinerja ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat perikanan karena peningkatan pendapatan masyarakat masih rendah karena usaha yang dimiliki masyarakat pembudidaya ikan pada umumnya masih skala kecil;
- 2) Sarana dan prasarana dinas perikanan yang diserahkan kepada ~~masyakat banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal;~~
- 3) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu dinas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat

perikanan. Salah satu program yang ada adalah pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan bantuan kepada masyarakat perikanan, yang menjadi masalah saat ini adalah jumlah usulan yang diajukan masyarakat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan masih banyak yang belum dapat diakomodir karena terbatasnya jumlah anggaran yang ada;

- 4) Terbatasnya jumlah SDM khususnya staf, karena itu dalam penyelesaian pekerjaan banyak yang belum tepat waktu dan banyak kegiatan yang baru dapat diselesaikan pada akhir Tahun.
- 5) Masih banyak Desa yang belum memiliki Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

### **2.3.28 Urusan Pertanian**

Permasalahan Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Handwritten notes in blue ink: a checkmark, the number '2', and the letters 'R' and 'H'.

- 2) Masalah Sarana dan Prasarana

Di samping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

- 3) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

### 2.3.29 Urusan Kehutanan

Permasalahan Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya upaya pemberian peran kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- 2) Kemampuan pasokan produksi kayu bulat dari hutan alam semakin berkurang yang berimbas banyaknya industri pengolahan kayu yang tutup;
- 3) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan;
- 4) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan, perkebunan dan pertambangan;
- 5) Masih sering terjadi gangguan keamanan hutan (illegal logging, kebakaran hutan) maupun klaim terhadap lahan perkebunan oleh masyarakat;
- 6) Adanya kecenderungan konflik sosial antara masyarakat didalam dan sekitar hutan dengan pelaku usaha dibidang kehutanan dan perkebunan;
- 7) Tingkat ekonomi sosial masyarakat sekitar hutan masih rendah;
- 8) Belum adanya komitmen yang kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran dibidang kehutanan dan perkebunan;
- 9) Kemampuan dan potensi hasil perkebunan dalam memenuhi kebutuhan industri dan mengakomodir kebutuhan lokal masyarakat belum tercukupi dengan baik dan belum terkelola dengan azas manfaat;
- 10) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- 11) Kebakaran hutandan lahan masih sering terjadi dimusim kemarau dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan atau penyiapan lahan pertanian dengan cara membakar;
- 12) Rehabilitasi hutan melalui program belum dapat mengimbangi laju kerusakan hutan dan rehabilitasi lahan masih bertumpu pada dana yang dikucurkan oleh pemerintah sehingga pengurangan lahan kritis berjalan lambat;
- 13) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan;

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

- 14) Pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengembangan pemanfaatan hasil perkebunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- 15) Keberadaan fungsi kawasan hutan masih kerap berbenturan dengan masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan;
- 16) Usaha pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa rotan, damar, kulit medang dan lain-lain masih memiliki potensi untuk dikembangkan namun belum digali dan dikelola dengan baik;
- 17) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 18) Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

### **2.3.30 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- 1) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang pertambangan.
- 2) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan.
- 3) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan pertambangan.

### **2.3.31 Urusan Pariwisata**

Permasalahan Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Promosi (Arakan Pengantin)

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Promosi ini (Festival Arakan Pengantin) merupakan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2014 yang menjadikannya terlalu mendadak untuk dilaksanakan sehingga waktu untuk melakukan persiapan dalam mengikuti kegiatan ini menjadi terlalu sempit.

2) Kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi ini adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah masalah Plotting Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menampilkan hiburan musik tersebut masih belum terakomodir.

3) Kegiatan Pengembangan Desain Kreatif

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desain Kreatif ini tidak mengalami kendala yang berarti, hanya saja dalam proses pencetakan terhambat karena file Desain dengan hasil yang diaplikasikan kemesin cetak mengalami perubahan sehingga harus di Desain ulang untuk menyesuaikan lagi, belum adanya usaha cetak batik di Kabupaten Kubu Raya sehingga proses pencetakan sedikit mengalami kesulitan karena harus mencetak di luar Kabupaten Kubu Raya.

4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek Pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Hambatan :

Belum adanya pengelolaan terhadap objek dan atraksi wisata di Kabupaten Kubu Raya serta kurangnya koordinasi dengan lembaga/dunia usaha.

5) Penyusunan rencana pengembangan wisata Gunung Ambawang

Hambatan :

Belum terencananya pengembangan objek wisata yang difokuskan pada wisata alam untuk pemanfaatan keasrian alam dan aksesibilitas yang kurang memadai.

6) Kajian potensi dan peluang Investasi Pariwisata Daerah KKR

Hambatan :

Berdasarkan hasil Analisis yang telah dilakukan pada 3 (tiga) objek Wisata Unggulan Kabupaten Kubu Raya, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih minimnya Atraksi Wisata yang ditawarkan pada masing-masing objek Wisata yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Rendahnya akses menuju objek Wisata terutama Pantai Paloh Nibung dan Gunung Ambawang.

3. Minimnya sarana Wisata di objek-objek Wisata di Kabupaten Kubu Raya mulai dari sarana pokok, sarana pelengkap hingga sarana penunjang Pariwisata.
- 7) Valuasi Ekonomi Pembangunan Pariwisata KKR  
Hambatan :  
Kurangnya usaha kecil pada sektor Pariwisata yang berdampak pada penggandaan pendapatan ekonomi Pariwisata.
- 8) Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata  
Hambatan :  
Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan pengiriman kontingen Promosi Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Explore Exotica Of Borneo yang diselenggarakan di Anjungan Kalimantan Selatan TMII Jakarta Tahun 2014 ini adalah kurangnya anggaran dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 9) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata  
Hambatan :  
Dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2014 ada beberapa hambatan dan kendala tetapi dapat diantisipasi dengan melibatkan Duta-duta Wisata Kabupaten Kubu Raya yang dikenal dengan nama GEMA, hanya saja peserta yang dikirim dari Kecamatan banyak yang tidak memenuhi persyaratan diantaranya kurangnya tinggi badan yang sudah ditentukan oleh Tingkat Nasional.
- 10) Monitoring dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan di bidang Pariwisata  
Hambatan :
  1. Kurangnya kuantitas SDM untuk menangani perizinan saat turun kelapangan.
  2. Belum maksimalnya penyampaian laporan tingkat hunian kamar (THK) dari pengusaha hotel kepada dinas.

### **2.3.32 Urusan Indsutri**

Permasalahan Urusan Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM masih minim karena masih banyak pelaku IKM belum terbina;



- 2) Tidak maksimalnya penyerapan uji analisa laboratorium dan belanja bahan percontohan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER5/2009 tentang ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa. Arahan dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

### **2.3.33 Urusan Perdagangan**

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyak agenda pameran yang tidak dapat diikuti karena anggaran tidak mencukupi untuk memehui semua undangan kegiatan pameran;
- 2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, tidak maksimalnya penyerapan dikarenakan kesulitan dalam hal mencari pihak kompeten sebagai tenaga ahli dalam tim monitoring gula terpadu;
- 3) Belum terlasananya penataan PKL yang diharapkan dapat berdagang dengan lokasi yang layak;
- 4) Belum terdatanya seluruh PKL dan pedangan tradisional di Kubu Raya dengan akurat.

### **2.3.34 Urusan Ketrasmigrasian**

Permasalahan Urusan Ketrasmigrasian adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya kuantitas dan terbatasnya SDM yang ada, bila dibandingkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosnakertran Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Minimnya anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan Dinas.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 serta proyeksi perekonomian tahun 2016 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kubu Raya berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berbagai langkah antisipasi dan informasi penting arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 harus menggambarkan:

- a. Asumsi indikator makro ekonomi daerah.
- b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Sesuai dengan sasaran nasional kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, untuk itu konsep pembangunan ekonomi yang pro poor, pro job dan pro growth akan terus dilanjutkan.

*Handwritten signature/initials in blue ink, possibly 'R' and 'F'.*

Pertumbuhan ekonomi didorong untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan minat investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor tetap diupayakan dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dalam maupun luar negeri dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, dan diupayakan memberikan insentif dan kemudahan investasi, harmonisasi kebijakan di semua tingkatan dan sektor, mendorong fasilitasi pembiayaan, memberikan fasilitasi ekspor.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan ragam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan. Implementasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dalam bentuk indikator makro sangat diperlukan untuk melihat gambaran tentang kondisi suatu daerah yang dilihat dari perspektif masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, serta perkembangan kinerja perekonomian daerah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi. Adapun Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt)  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>TPT (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Sambas	5,99	3,03
2.	Bengkayang	6,04	2,30
3.	Landak	6,21	3,24
4.	Mempawah	5,08	5,66
5.	Sanggau	6,04	0,78
6.	Ketapang	6,97	4,70
7.	Sintang	6,34	4,03
8.	Kapuas Hulu	6,01	1,51
9.	Sekadau	6,71	1,44
10.	Melawi	6,73	3,99
11.	Kayong Utara	6,00	4,66
<b>12.</b>	<b>Kubu Raya</b>	<b>6,79</b>	<b>9,26</b>
13.	Kota Pontianak	6,91	6,12
14.	Kota Singkawang	6,36	4,59
<b>Kalimantan Barat</b>		<b>6,50</b>	<b>4,03</b>

Sumber: Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya lebih tinggi diatas rata-rata Kalimantan Barat dan berada di peringkat ke 3 (tiga) setelah Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Perekonomian Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan angka lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 6,51% pada tahun 2011, tahun 2012 mencapai 6,69% dan mencapai 6,79% pada tahun 2013 serta tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat.

Akan tetapi pertumbuhan positif perekonomian Kabupaten Kubu Raya tidak diiringi dengan penanggulangan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai angka 9,26 % karena mengalami trend naik yakni dari 4,52 % pada Tahun 2011, Tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,06 %. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kubu Raya perlu mendapat perhatian yaitu sebagian besar atau sekitar 31,01% penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja tidak mendapatkan upah secara resmi, dan produktivitasnya juga cenderung belum/kurang optimal. Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya menempati urutan tertinggi di Kalimantan Barat.

Selain upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka, upaya untuk menurunkan penduduk miskin juga akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Upaya tersebut akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaannya dengan akses dan harga terjangkau.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan. Berbagai perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan.

Dengan demikian prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2016, secara umum tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap diusahakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 6,79 %, dan Tahun 2016 diharapkan relatif tidak jauh berbeda, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun 2015 adalah sebesar 6,90% dan 7,00 % untuk Tahun 2016.

Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,00% pada Tahun 2016 tersebut, tidak semata-mata sekedar pertumbuhan dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan-kabupaten) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Ditargetkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 6,27%.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan tingkat pengangguran.
- d. Upaya pencapaian dari sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tujuan MDG's, Standar Pelayanan Minima (SPM), Food Estate serta penanganan komoditi unggulan secara signifikan.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan memecahkan permasalahan penting dan mendesak menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sektor), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2016 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur,

maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan pokok-pokok kebijakan suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya. Secara umum pokok-pokok kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016, didasarkan pada :

- a. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan kegiatan yang mendukung *program pro growth, pro poor, pro job dan pro environment*.
- b. Pelaksanaan kebijakan keuangan didasarkan pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya diarahkan kepada upaya mengatasi masalah pembangunan dengan intensitas keterdesakan tinggi, yang menjadi kendala utama pembangunan.
- c. Kebijakan Keuangan Daerah mengedepankan keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Keuangan daerah dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh pengeluaran maupun penerimaan.
- f. Meningkatkan peran redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antardaerah, atau antar golongan pendapatan.

- g. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada upaya menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- h. Keuangan daerah harus dapat memberikan keleluasaan kepada para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk seluruh siklus anggaran pengelolaan keuangan daerah harus taat azas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggung-jawabannya baik dalam kerangka hukum maupun dalam kerangka administrasi.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2013-2015 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengingat besarnya potensi perolehan PAD Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berakibat pada penciptaan ekonomi biaya tinggi, inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Upaya peningkatan pendapatan daerah selain *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- b. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya diprediksi mengalami peningkatan sebesar 10% tiap tahunnya.

Realisasi dan proyeksi target Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah					Proyeksi 2017
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>64.277.117.327,27</b>	<b>97.407.483.796,39</b>	<b>98.150.899.043,10</b>	<b>109.146.737.946,00</b>	<b>127.651.145.302,93</b>	
1.1.1	Pajak Daerah	48.513.648.885,95	64.729.599.444,05	80.488.049.986,00	90.552.299.983,00	104.672.616.268,09	
1.1.2	Retribusi Daerah	11.575.759.260,00	25.180.126.655,62	7.074.697.775,00	8.006.286.680,00	9.208.913.590,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.756.499,13	563.736.663,41	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	3.576.303.498,32	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.020.952.682,19	6.934.021.033,31	7.838.151.282,10	7.838.151.282,10	10.193.311.945,63	
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>774.980.539.716,00</b>	<b>841.715.445.482,00</b>	<b>913.894.089.000,00</b>	<b>913.894.089.000,00</b>	<b>913.894.089.000,00</b>	
1.2.1	Dana Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.438.716,00	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	627.894.391.000,00	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.923.710.000,00	82.076.280.000,00	103.521.030.000,00	124.602.430.000,00	124.602.430.000,00	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>116.410.365.638,00</b>	<b>153.166.891.640,91</b>	<b>227.153.417.351,90</b>	<b>230.581.995.000,00</b>	<b>230.581.995.000,00</b>	
1.3.1	Hibah	1.380.802.021,00	410.910.000,00	0,00	0,00	0,00	



NO	Uraian	Jumlah						
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017		
1	2	3	4	5	6	7		
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.174.451.617,00	27.118.612.640,91	56.784.669.956,90	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.724.000.000,00	30.474.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	73.131.112.000,00	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	
1.3.7	Dana Kapitasi FKTP Dana Desa	0,00 0,00	0,00 0,00	14.400.000.000,00 34.437.653.000,00	14.400.000.000,00 34.437.653.000,00	14.400.000.000,00 34.437.653.000,00	14.400.000.000,00 34.437.653.000,00	
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>955.668.022.681,27</b>	<b>1.092.289.820.919,30</b>	<b>1.218.198.405.395,00</b>	<b>1.253.622.821.946,00</b>	<b>1.272.127.229.302,04</b>		

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Sedangkan Target Pendapatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.3. sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Target Pendapatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>14.843.909.619,00</b>	<b>88.138.698.876,80</b>	<b>94.308.407.744,21</b>	<b>100.909.996.286,90</b>	<b>107.973.639.025,72</b>
1.1.1	Pajak Daerah	8.902.316.568,20	47.122.347740,00	50.420.912.082,00	53.950.375.928,00	57.726.902.242,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.219.980.489,00	10.831.710.970,00	11.589.930.738,00	12.401.225.890,00	13.269.311.702,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.721.612.561,80	30.184.640.166,80	32.297.564.924,21	34.558.394.468,90	36.977.482.081,72
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>623.799.571.814,020</b>	<b>837.455.694.000,00</b>	<b>921.263.400.000,00</b>	<b>100.909.996.286,90</b>	<b>1.114.653.527.704,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.922.298.160,00	55.678.984.000,00	61.246.882.400,00	67.371.570.640,00	74.108.727.704,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	549.838.274.854,00	699.700.430.000,00	769.670.473.000,00	846.637.520.000,00	931.301.272.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.038.998.800,00	82.076.280.000,00	90.283.908.000,00	99.312.298.000,00	109.243.528.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>33.003.513.049,20</b>	<b>144.403.606.735,00</b>	<b>191.810.967.408,00</b>	<b>210.992.064.149,00</b>	<b>232.091.270.534,00</b>
1.3.1	Hibah	10.980.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)	Target 2013 *)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.700.858.049,20	56.525.330.000,00	62.177.863.000,00	68.395.649.300,00	75.235.214.200,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	10.321.905.000,00	0,00	0,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	30.000.000,00	33.000.000.000,00	36.300.000.000,00	39.930.000.000,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	0,00	87.848.276.735,00	96.633.104.408,00	106.296.414.849,00	116.926.056.334,00
1.3.7	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>671.646.994.482,20</b>	<b>1.069.997.999.611,80</b>	<b>1.207.320.638.552,21</b>	<b>1.325.223.449.075,90</b>	<b>1.454.718.494.263,72</b>

Sumber : \*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014

\*\*\*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

Dari Tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 955.668.022.681,27 atau naik sebesar 42,29% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 671.646.994.482,20 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.277.117.327,27 atau naik sebesar 333,02% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun

2009-2014 sebesar Rp. 14.843.909.619,00. Dana Perimbangan Rp. 774.980.539.716,00 atau naik sebesar 24,24% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 623.799.571.814,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 116.410.365.638,00 atau naik sebesar 252,72% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 33.003.513.513.049,20.

Tahun 2015 target pendapatan sebesar Rp. 1.264.418.153.000,00 atau naik sebesar 4,73% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21. dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 98.157.399.043,10 atau naik sebesar 4,08% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 94.308.407.744,21, Dana Perimbangan Rp. 913.894.089.000,00 atau turun sebesar 0,79% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 921.201.263.400,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 252.366.664.956,90 atau naik sebesar 31,57%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 191.810.967.408,00.

Tahun 2016 proyeksi target pendapatan sebesar Rp. 1.253.622.821.946,00 atau turun sebesar 5,40,% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Berkurangnya target pendapatan Tahun 2016 ada pada komponen dari Dana Perimbangan dikarenakan pada Tahun 2016 masih mengikuti angka Tahun 2015 sebesar Rp. 913.894.089.000,00 atau berkurang 9,81% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar RP. 1.013.321.388.640,00. Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 proyeksi sebesar Rp. 109.146.737.946,00 atau naik sebesar 8,16% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 100.909.996.286,90, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah proyeksi sebesar Rp. 230.581.995.000 atau naik sebesar 9,28%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 210.992.064.149,00. Sedangkan Tahun 2017 proyeksi target pendapatan sebesar Rp. 1.272.127.229.302,04 atau turun sebesar 12,55,% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang menargetkan sebesar Rp. 1.454.718.494.263,72. Berkurangnya target pendapatan Tahun 2016 ada pada komponen dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dearah Yang Sah dikarenakan pada

Tahun 2017 masih mengikuti angka Tahun 2016 sebesar Rp. 1.144.476.084.000,00 atau turun sebesar 15,02% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.346.744.798.238,00. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 127.651.145.302,04 atau naik sebesar 18,22% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang hanya sebesar Rp. 107.973.696.025,72.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan Belanja Langsung.

Belanja Daerah yang akan disusun dalam Alokasi Belanja Tak Langsung dan Alokasi Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

- a. Tujuan, Sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
- b. Indikator kinerja harus jelas;
- c. Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus tetap memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin

dicapai, dan diprioritaskan kepada strategi untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 yaitu:

- a. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas;
- c. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Daerah;
- d. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini :

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R. H. H."

**Tabel 3.4**

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	564.527.250.044,00	618.749.667.806,31	618.749.667.806,31
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.663.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	51.728.720.495,00	124.312.653.000,00	124.312.653.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>486.854.901.789,60</b>	<b>522.075.355.561,23</b>	<b>623.795.970.539,00</b>	<b>758.812.320.806,31</b>	<b>758.812.320.806,31</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	45.297.946.626,00	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	202.234.525.117,00	-	-

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	402.917.806.986,00	-	-
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>461.487.906.788,00</b>	<b>509.807.831.069,00</b>	<b>650.450.278.729,00</b>	<b>550.753.968.700,00</b>	<b>686.174.753.269,00</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>948.342.808.577,60</b>	<b>1.031.883.186.630,23</b>	<b>1.274.246.249.268,00</b>	<b>1.288.320.919.757,00</b>	<b>1.444.987.074.075,31</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>7.325.214.103,67</b>	<b>60.406.634.289,07</b>	<b>(56.047.843.873,00)</b>	<b>(64.672.097.811,00)</b>	<b>(202.833.844.773,27)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Sedangkan Target Pendapatan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :



**Tabel 3.5**

Target Belanja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Belanja Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	4	5	6	Target 2013 *)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
2.1.1	Belanja Pegawai	533.014.991.714,00	444.158.038.679,00	488.573.842.547,00	537.431.226.802,00	591.174.349.482,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.075.916.500,00	24.102.000.000,00	24.584.000.000,00	25.075.000.000,00	25.577.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.280.281.709,00	6.067.000.000,00	6.370.000.000,00	6.688.000.000,00	7.023.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.118.060.200,00	25.519.680.000,00	27.306.057.000,00	29.217.481.000,00	31.262.705.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.196.150.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	1.200.000.000,00
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>577.685.400.123,00</b>	<b>500.146.718.679,00</b>	<b>547.433.899.547,00</b>	<b>599.311.707.802,00</b>	<b>656.237.054.482,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
2.2.1	Belanja Pegawai	19.614.405.536,00	47.385.176.742,00	49.754.435.579,00	52.242.157.358,00	54.854.265.225,00

NO	Uraian	Jumlah Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya						
		Realisasi 2013 *)	Realisasi 2014 **)	Target 2015 **)	Proyeksi 2016 **)	Proyeksi 2017 **)		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.888.435.864,00	209.778.988.022,04	230.756.886.824,21	253.832.575.506,90	279.215.833.058,00		
2.2.3	Belanja Modal	146.129.585.063,00	373.641.971.060,00	379.375.416.602,00	419.837.008.409,00	464.411.341.499,00		
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>250.632.426.463,00</b>	<b>630.806.135.824,04</b>	<b>659.886.739.005,21</b>	<b>725.911.741.273,90</b>	<b>798.481.439.782,00</b>		
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>828.317.826.586,00</b>	<b>1.130.952.854.503,04</b>	<b>1.207.320.638.552,21</b>	<b>1.325.223.449.075,90</b>	<b>1.454.718.494.264,00</b>		
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(156.670.832.103,80)</b>	<b>(60.954.854.891,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,28)</b>		

Sumber : \*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014

\*\*\*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 948.342.808.577,60 atau naik sebesar 14,49% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 828.317.826.586,00. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 486.854.901.789,60 atau turun sebesar 15,72% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 577.685.400.123,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 461.487.906.788,00 atau naik sebesar 84,13% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 250.632.426.463,00.

Tahun 2015 jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 1.299.459.496.873,00 atau naik sebesar 7,63% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 640.035.218.144,00 atau naik sebesar 16,92% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 547.433.899.547,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 659.424.278.729,00 atau turun sebesar 0,07% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 659.886.739.005,21.

Tahun 2016 Proyeksi jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 1.444.987.074.075,31 atau naik sebesar 9,04% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Proyeksi Belanja tidak langsung sebesar Rp. 758.812.320.806,31 atau naik sebesar 26,61% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 599.311.707.802,00. Proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp. 686.174.753.269,00 atau turun sebesar 5,47% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 725.911.741,273,90. Dan Proyeksi Tahun 2017 masih mengikuti proyeksi belanja Tahun 2016.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.

R  
R  
R  
R

**Tabel 3.6**

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,00	1.599.417.546,39	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>34.409.039.026,65</b>	<b>8.210.627.130,32</b>	<b>61.617.261.419,00</b>	<b>1.599.417.546,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	1.470.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>33.523.626.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>3.970.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>885.413.026,65</b>	<b>1.210.627.130,32</b>	<b>57.647.261.419,00</b>	<b>(6.500.000.000,00)</b>	<b>(6.500.000.000,00)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Jumlah pengeluaran pembiayaan netto Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 885.413.026,65 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 34.409.039.026,65 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 33.523.626.000,00. Tahun 2014 jumlah pengeluaran pembiayaan netto sebesar Rp. 1.210.627.130,32 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 8.210.627.130,32 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 56.047.843.873,00 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 60.017.843.873,00 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.970.000.000,00 sedangkan untuk proyeksi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp. 6.500.000.000,00 dari jumlah pengeluaran pembiayaan.

Dari jumlah realisasi pendapatan dikurangi jumlah realisasi belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 terdapat Surplus sebesar Rp. 7.325.214.103,67 begitu juga Tahun 2014 Surplus sebesar Rp. 60.406.634.289,07. Tahun 2015 sementara sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 masih terdapat defisit sebesar Rp. 56.047.843.873,00 yang diakibatkan dari target pendapatan yang belum tercapai dari target pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Proyeksi Tahun 2016 Surplus sebesar Rp. 6.500.000.000,00. Sedangkan Sisa Silpa Tahun 2013 sebesar Rp. 8.210.627.130,32 dan Tahun 2014 sebesar Rp. 633.042.353.907,78.

Untuk lebih jelas Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.7 dibawah ini :

R  
R  
R

**Tabel 3.7**

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>64.277.117.327,27</b>	<b>97.407.483.796,39</b>	<b>98.150.899.043,10</b>	<b>109.146.737.946,00</b>	<b>127.651.145.302,93</b>
1.1.1	Pajak Daerah	48.513.648.885,95	64.729.599.444,05	80.488.049.986,00	90.552.299.983,90	104.672.616.268,09
1.1.2	Retribusi Daerah	11.575.759.260,00	25.180.126.655,62	7.074.697.775,00	8.006.286.680,00	9.208.913.590,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.756.499,13	563.736.663,41	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	3.576.303.498,32
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.020.952.682,19	6.934.021.033,31	7.838.151.282,10	7.838.151.282,10	10.193.311.945,63
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>774.980.539.716,00</b>	<b>841.715.445.482,00</b>	<b>892.894.089.000,00</b>	<b>892.894.089.000,00</b>	<b>892.894.089.000,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.438.716,00	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	627.894.391.000,00	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.923.710.000,00	82.076.280.000,00	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>116.410.365.638,00</b>	<b>153.166.891.640,91</b>	<b>227.153.417.351,90</b>	<b>221.607.995.000,00</b>	<b>221.607.995.000,00</b>
1.3.1	Hibah	1.380.802.021,00	410.910.000,00	0,00	0,00	0,00



NO	Uraian	Jumlah					Proyeksi 2017
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.174.451.617,00	27.118.612.640,91	56.784.669.956,90	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.724.000.000,00	30.474.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	73.131.112.000,00	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>955.668.022.681,27</b>	<b>1.092.289.820.919,30</b>	<b>1.264.418.153.000,00</b>	<b>1.253.622.821.946,00</b>	<b>1.272.127.229.304,04</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	564.527.250.044,00	618.749.667.806,31	618.749.667.806,31	618.749.667.806,31
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.663.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	67.967.968.100,00	124.312.653.000,00	124.312.653.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>486.854.901.789,60</b>	<b>522.075.355.561,23</b>	<b>640.035.218.144,00</b>	<b>758.812.320.806,31</b>	<b>758.812.320.806,31</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	45.297.946.626,00	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	211.208.525.117,00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	402.917.806.986,00	-	-
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>461.487.906.788,00</b>	<b>509.807.831.069,00</b>	<b>659.424.278.729,00</b>	<b>686.174.753.269,00</b>	<b>686.174.753.269,00</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>948.342.808.577,60</b>	<b>1.031.883.186.630,23</b>	<b>1.298.959.496.873,00</b>	<b>1.444.987.074.075,31</b>	<b>1.444.987.074.075,31</b>
	Surplus/(Defisit)	7.325.214.103,67	60.406.634.289,07	(35.041.343.873,00)	(191.364.252.129,31)	(172.859.844.773,27)

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>34.409.039.026,65</b>	<b>8.210.627.130,32</b>	<b>61.617.261.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	1.470.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>33.523.626.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>3.970.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>885.413.026,65</b>	<b>1.210.627.130,32</b>	<b>57.647.261.419,00</b>	<b>(6.500.000.000,00)</b>	<b>(6.500.000.000,00)</b>

<b>G</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rencana (SILPA)</b>	<b>8.210.627.130,32</b>	<b>61.617.261.419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)</b>	<b>477.909.161.048,64</b>	<b>633.042.353.907,78</b>	<b>682.030.196.275,00</b>	<b>488.310.501.139,69</b>	<b>506.814.908.495,73</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015  
Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna memadukan langkah para pemangku kepentingan untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Dari masalah-masalah yang ada, maka disusunlah sasaran-sasaran pencapaiannya menunjukkan tingkat kinerja program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 sebagai tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memiliki arti strategis karena meletakkan landasan bagi pencapaian target-target pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dan melanjutkan pembangunan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja pembangunan tahun 2016 tersebut tidak terlepas dan saling terkait pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yaitu : “*Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta Memiliki Daya Saing*” yang dapat dijelaskan bahwa:

**Maju**, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

**Harmonis dan Berbudaya**, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

**Memiliki Daya Saing**, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*);
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas;

3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah;
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Visi dan Misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, telah ditetapkan dan dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

TAHUN					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah	Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, maka arah kebijakan tahunan yang akan menjadi Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yaitu Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 memprioritaskan fokus pembangunan daerah yang ditujukan pada peningkatan dan pemantapan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah, serta membuka isolasi daerah dan mendorong berkembangnya sektor perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2015 ini juga sudah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sosial budaya sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya pada Tahun 2017 pembangunan infrastruktur wilayah dan prasarana umum lain masih terus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor sektor unggulan Kabupaten Kubu Raya terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pada Tahun 2018 dalam rangka memberikan akselerasi pada pertumbuhan ekonomi dilakukan pembangunan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan sentra-sentra ekonomi unggulan Kabupaten Kubu Raya khususnya pada kawasan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan tanaman pangan berkelanjutan (food estate), kawasan industri, jasa dan perdagangan. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan nilai tambah pada usaha-usaha ekonomi berbasis agroindustri, sumber daya alam dan potensi masyarakat.

Pada akhir RPJMD kedua Tahun 2019 diharapkan target-target prioritas pembangunan jangka menengah sebagian besar sudah dapat dicapai sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan pada semua aspek prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur wilayah sehingga dapat memberikan daya tarik dan nilai tambah bagi Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi tujuan investasi yang kondusif dan tempat hunian yang didukung oleh infrastruktur wilayah, sarana dan prasarana yang memadai.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan  
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing				
<b>MISI I</b> : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa ( <i>Good Governance</i> )				
	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Meningkatkan aparatur yang berkualitas dan profesional	1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan profesional	1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional 2. Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 3. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Mendorong keterlibatan dan peran serta aktif stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan		1. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel 2. Memberikan akses informasi sistem perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)

FR → TR



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>1</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima</p>	<p>2</p> <p>1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan public</p>	<p>3</p> <p>1. Mengembangkan kapasitas dan mengaktifkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik</p>	<p>4</p> <p>1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik</p> <p>2. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>3. Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja</p>
		<p>2. Menyediakan akses layanan pengaduan yang cepat</p>	<p>1. Membentuk unit layanan pengaduan yang responsive dan akuntabel</p> <p>2. Memberikan kemudahan/fasilitas dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan publik</p>

FR 2 TR

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing			
<b>MISI II</b> : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas Dan Memiliki Kreativitas			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat 2. Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi siswa miskin 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak 4. Pemerataan jumlah sekolah
		2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 2. Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata
		3. Mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan daerah	1. Membangun sekolah kejuruan 2. Menyediakan sarana penunjang/fasilitas bagi sekolah kejuruan
		4. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Memberikan insentif pendidikan bagi penduduk miskin 2. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><b>1</b></p> <p>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p>	<p><b>2</b></p> <p>1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</p>	<p><b>3</b></p> <p>1. Peningkatan akses kesehatan masyarakat</p>	<p><b>4</b></p> <p>1. Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat</p> <p>2. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>3. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap</p> <p>4. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan desa siaga</p> <p>5. Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pedesaan</p> <p>6. Meningkatkan kualitas surveillance berbasis masyarakat</p> <p>7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB Mandiri</p>
		<p>2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.</p> <p>2. Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat</p>

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
3. Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> dalam pelestarian budaya	1. Meningkatkan kepedulian <i>stakeholder</i> terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas	1. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam melestarikan seni dan budaya	3. Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan seni budaya yang kreatif
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Meningkatkan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama	1. Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat 2. Membina kerukunan kehidupan beragama 3. Mengembangkan lembaga Pembina keagamaan 1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> keagamaan 2. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing			
<b>MISI III</b> : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	1. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif  2. Peningkatan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang ekonomi kreatif masyarakat	1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah 2. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat 3. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah 4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif  1. Meningkatkan akses pemodalalan bagi UMKM dan koperasi 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna 3. Memfasilitasi pemenuhan standart mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	2. Meningkatkan investasi penanaman modal daerah	1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan investasi untuk menunjang perekonomian daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru  2. Peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Mempermudah proses perizinan 2. Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah 3. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah  1. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja 2. Meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi usaha 3. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah
	3. Meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat 2. Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri 3. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan	1. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		<p>2. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dengan fungsi lingkungan hidup</p> <p>1. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan</p>	<p>2. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan</p> <p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh</p> <p>1. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan</p> <p>2. Melakukan perlindungan/konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan</p>
	2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan	<p>1. Meningkatkan ketersediaan kualitas pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan</p> <p>2. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian</p> <p>3. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan</p> <p>4. Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan</p>

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**VISI** : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing

**MISI IV** : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Menyediakan Infrastruktur Wilayah yang layak	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi	1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah 2. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman 3. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar 4. Pengembangan, peningkatan dan fasilitasi penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi
2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi	1. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir 2. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik	3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik	1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas 2. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	1. Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman infrastruktur	3. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih 1. Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman. 2. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni 3. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya	1. Menetapkan rencana umum dan rancangan rinci Kabupaten Kubu Raya 2. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan 3. Meningkatkan dalam kapasitas penataan ruang	1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan 1. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan 1. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		4. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang	1. Penetapan ruang terbuka hijau
	2. Terkendalinya pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Persampahan	1. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif
			2. Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak
			3. Penambahan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
			4. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi
		2. Peningkatan kapasitas personil pengolahan persampahan	1. Penambahan petugas pengelola persampahan
			2. Memberikan jaminan sosial dan kesehatan petugas pengelola persampahan

FR 12

## 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2020 atau disebut "**Nawacita**" adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tema pembangunan Nasional Tahun 2016 yang berkenaan dengan Nawacita adalah "**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas**", sedangkan tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah "**Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Sinergitas Sektor-Sektor Pembangunan**"

Dengan mengacu agenda Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, maka tema Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah "**Peningkatan dan Pemanfaatan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan serta Mendorong Percepatan Pembangunan Konektivitas Wilayah Kalimantan Barat**"

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tetap mengacu kepada Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Kubu Raya dengan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat  
Dan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

<b>NASIONAL</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>KABUPATEN KUBU RAYA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas.	Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Sinergitas Sektor-Sektor Pembangunan.	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur Dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Serta Mendorong Percepatan Pembangunan Konektivitas Wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa tema pembangunan daerah tahun 2016 secara umum selaras dan saling terkait, dimana pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai pondasi menunjang pembangunan yang berkualitas, diantaranya menunjang prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan kemandirian pangan serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga memprioritaskan peningkatan dan pemantapan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat yang seiring dan sejalan dengan tema nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi dengan Kabupaten Kubu Raya yang tercermin dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur, didukung dengan upaya:
  - a. Peningkatan Infrastruktur.
  - b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
2. Peningkatan dan Pemantapan Pelayanan Dasar, didukung dengan upaya:
  - a. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan.
  - b. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa.
  - c. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual.
3. Mendorong Percepatan Pembangunan, didukung dengan upaya:
  - a. Peningkatan Kesejahteraan.
  - b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.

c. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif.

Selain keselarasan tema, keselarasan prioritas pembangunan juga sangat menentukan terwujudnya sinkronisasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Keselarasan antara prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat dengan Prioritas Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten  
Provinsi Dan Nasional

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>PRIORITAS KABUPATEN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	- Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya Dan Mental Spiritual
2	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya	Peningkatan Kecerdasan Sumberdaya Manusia	- Peningkatan Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa
3	Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	- Peningkatan Infrastruktur
4	Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	- Peningkatan Kesejahteraan
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	- Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>PRIORITAS KABUPATEN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional	Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan	- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah - Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian serta Ketahanan Budaya	- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	- Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya Dan Mental Spiritual
9	Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	- Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya Dan Mental Spiritual

Prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya menentukan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yaitu dengan menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan masyarakat dengan melihat indikator :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Kemiskinan.
- c. Tingkat Pengangguran.
- d. Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran pembangunan kewilayahan Tahun 2016 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

Keselarasan Kewilayahan Tahun 2016

NO	INDIKATOR SASARAN KEWILAYAHAN	TAHUN 2013	
		KALBAR	KUBU RAYA
1	2	3	4
1	IPM	70,9	69,3
2	Kemiskinan	7,96	6,27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,79	9,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,50	6,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut di atas, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya masih berada dibawah IPM Provinsi Kalbar, sementara Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 6,79% berada diatas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Handwritten signature or initials in blue ink, appearing vertically on the right side of the page.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		<p>2. Peningkatan revitalisasi pertanian dan pengembangan pusat agrobisnis dan agroindustri</p> <p>3. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan</p>	<p>1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan</p> <p>2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian</p> <p>3. Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri</p> <p>4. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri</p> <p>1. Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan</p> <p>3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan</p> <p>1. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> <p>2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup</p>

FR 7 FR



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2016**

**5.1 Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, Prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas;
3. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah; serta
4. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

**A. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Penyediaan Operasional Sekolah
9. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

13. Program Penyehatan Lingkungan
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
19. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
20. Program Keluarga Berencana
21. Program Pelayanan Kontrasepsi
22. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
23. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
24. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
25. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
26. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
27. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
28. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
29. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
30. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
31. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

#### **B. Peningkatan Kesejahteraan**

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

**C. Peningkatan Infrastruktur**

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Pemanfaatan Ruang
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)
19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
20. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)
21. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)
22. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

**D. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

**E. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual**

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama

**F. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
12. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan
16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
19. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

**G. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

#### **H. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
5. Program Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

#### **5.2 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2016**

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten diperkirakan sebesar Rp. 1.154.696.793.527,00. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 737.566.951.057,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 550.753.968.700,00.

Proyeksi dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.253.622.821.946,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0,00 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung tidak semuanya terakomodir dalam dokumen RKPD.

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 603.942.824.827,00 dengan rincian Belanja Gaji sebesar Rp. 409.261.434.299,00 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 194.681.390.528,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 6.261.473.230,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.500.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 124.312.653.000,00 dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 34.437.653.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 89.000.000.000,00, dan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) sebesar Rp. 875.000.000,00 serta Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 550.000.000,00. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 550.753.968.700,00 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rekapitulasi estimasi jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**

Estimasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	425.229.423.085,00	85.053.855.709,00	510.283.278.794,00
2	Dinas Kesehatan	48.075.861.101,00	51.435.033.928,00	99.510.895.029,00
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	3.960.162.392,00	100.497.947.884,00	104.458.110.276,00
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan	3.526.450.682,00	99.088.692.888,00	102.615.143.570,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.015.955.074,00	3.910.804.452,00	6.926.759.526,00
6	Dinas Perhubungan	4.410.434.829,00	4.379.420.100,00	8.789.854.929,00
7	Badan Lingkungan Hidup	2.353.305.325,00	4.639.854.048,00	6.993.159.373,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.182.406.368,00	2.200.000.000,00	5.382.406.368,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2.687.211.119,00	5.917.891.500,00	8.605.102.619,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	3.890.075.607,00	2.900.000.000,00	6.790.075.607,00
11	Dinas Koperasi dan UMKM	2.788.845.687,00	3.100.000.000,00	5.888.845.687,00
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.736.785.873,00	2.900.000.000,00	5.636.785.873,00
13	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	2.293.425.566,00	2.900.000.000,00	5.193.425.566,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	859.989.532,00	600.000.000,00	1.934.823.475,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.334.823.475,00	4.590.028.500,00	5.450.018.032,00
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.954.735.100,00	-	11.954.735.100,00
17	Bupati dan Wakil Bupati	588.554.221,00	-	588.554.221,00
18	Sekretariat Daerah	10.143.859.000,00	59.000.000.000,00	69.143.859.000,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.727.235.473,00	19.000.000.000,00	21.727.235.473,00
20	Inspektorat Daerah	4.104.432.983,00	3.100.000.000,00	7.204.432.983,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	2.802.241.864,00	5.000.000.000,00	7.802.241.864,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.939.671.885,00	6.000.000.000,00	10.939.671.885,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	2.225.622.568,00	5.700.000.000,00	7.925.622.568,00
24	Kecamatan Sungai Raya	2.197.430.490,00	690.000.000,00	2.887.430.490,00
25	Kecamatan Kuala Mandor B	1.489.228.428,00	590.000.000,00	2.079.228.428,00
26	Kecamatan Sungai Ambawang	1.660.468.905,00	600.000.000,00	2.260.468.905,00
27	Kecamatan Terentang	1.431.711.709,00	600.000.000,00	2.031.711.709,00
28	Kecamatan Batu Ampar	1.770.104.733,00	700.000.000,00	2.470.104.733,00
29	Kecamatan Kubu	1.779.069.042,00	580.000.000,00	2.359.069.042,00
30	Kecamatan Rasau Jaya	1.696.563.058,00	640.000.000,00	2.336.563.058,00

FTP → R

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
31	Kecamatan Teluk Pakedai	1.624.725.080,00	620.000.000,00	2.244.725.080,00
32	Kecamatan Sungai Kakap	1.994.046.883,00	800.000.000,00	2.794.046.883,00
33	Dinas Pedapatan Daerah	3.193.881.772,00	4.400.000.000,00	7.593.881.772,00
34	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.492.237.594,00	2.700.000.000,00	5.192.237.594,00
35	Kantor Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	1.217.501.663,00	900.000.000,00	2.117.501.663,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.331.704.009,00	3.000.000.000,00	5.331.704.009,00
37	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.178.177.307,00	34.423.952.000,00	39.602.129.307,00
38	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	9.053.993.613,00	4.086.157.500,00	13.140.151.113,00
39	Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan	8.609.951.617,00	9.099.076.765,00	17.709.028.382,00
40	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.591.046.193,00	9.981.063.626,00	13.572.109.819,00
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.799.473.922,00	9.981.063.626,00	7.229.663.722,00
	<b>Sub Total (A)</b>	<b>603.942.824.827,00</b>	<b>550.753.968.700,00</b>	<b>1.154.696.793.527,00</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Belanja Hibah	6.261.473.230,00	-	6.261.473.230,00
2	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.312.653.000,00	-	124.312.653.000,00
4	Belanja Tidak Terduga	550.000.000,00	-	550.000.000,00
	<b>Sub Total (B)</b>	<b>133.624.126.230,00</b>	-	<b>133.624.126.230,00</b>
	<b>Jumlah Total ( A + B )</b>	<b>737.566.951.057,00</b>	<b>550.753.968.700,00</b>	<b>1.288.320.919.757,00</b>

Sumber : Data Kompilasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

FR 2 R

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 ini, dikemukakan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Tahun 2016. Rencana Program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Lampiran I.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan terdapat 419 usulan program dan 2.507 kegiatan yang berhasil dihimpun dengan mencantumkan asal sumber dana untuk program dan kegiatan yang mereka usulkan. Dari usulan tersebut usulan yang bersumber pendanaan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 905.220.210.300, Pendanaan dari APBD Provinsi sebesar Rp. 389.900.010.100, Pendanaan dari APBN Rp. 1.174.527.500.000 sedangkan dari APBDes sebesar Rp. 1.467.500.000. Akan tetapi usulan hasil musrenbang Kecamatan ini akan dipertimbangkan oleh SKPD yang memang menjadi kewenangan mereka dan kegiatan tersebut memang telah masuk dalam Renstra SKPD mereka. Rekapitulasi daftar usulan Musrenbang Kecamatan disajikan pada Tabel 5.2 berikut:

*Handwritten signature*

**Tabel 5.2**

Rekapitulasi Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA						KECAMATAN
			APBD KAB (Rp)	APBD PROV (Rp)	APBN (Rp)	APBDES (Rp)	JUMLAH (Rp)	8=4+5+6	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=4+5+6</b>	<b>9</b>	
1	57	476	156.714.750.000,00	38.525.000.000,00	1.004.030.000.000,00	110.000.000,00	1.199.379.750.000,00	Batu Ampar	
2.	25	103	22.615.000.200,00	114.350.000.000,00	58.100.000.000,00	15.000.000,00	195.080.000.200,00	Kuala Mandor B	
3.	53	250	99.684.800.000,00	9.500.000.000,00	47.500.000.000,00	209.500.000,00	156.894.300.000,00	Kubu	
4.	40	114	30.957.660.000,00	2.250.000.000,00	6.625.000.000,00	-	39.832.660.000,00	Rasau Jaya	
5.	41	301	99.625.000.000,00	8.850.000.000,00	6.200.000.000,00	38.000.000,00	114.713.000.000,00	Sungai Ambawang	
6.	74	406	139.955.000.000,00	157.860.000.100,00	43.712.500.000,00	1.095.000.000,00	342.622.500.100,00	Sungai Kakap	
7.	53	515	173.950.000.100,00	5.385.010.000,00	6.000.000.000,00	-	185.335.010.100,00	Sungai Raya	
8.	46	249	71.858.000.000,00	27.180.000.000,00	2.360.000.000,00	-	101.398.000.000,00	Teluk Pakedai	
9	30	93	109.860.000.000,00	26.000.000.000,00	-	-	135.860.000.000,00	Terentang	
	<b>419</b>	<b>2.507</b>	<b>905.220.210.300,00</b>	<b>389.900.010.100,00</b>	<b>1.174.527.500.000,00</b>	<b>1.467.500.000,00</b>	<b>2.471.115.220.400,00</b>		

Sumber : Data Kompilasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian diprioritaskan pada rencana pembangunan tahun 2016 dalam program dan kegiatan bagi pencapaian visi dan misi serta Tahapan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya 2014-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 yang juga merupakan penjabaran dari tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah pada tahun awal periode RPJMD di Tahun 2016. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2016 dengan mendasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2016 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2016.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing”***.

Diundang di Sungai Raya  
Pada Tanggal 16 Mei 2015  
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI